

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN SEKTOR UNGGULAN  
DI PROVINSI PAPUA BARAT**

**SKRIPSI**



Oleh:

Nama : Indah Wulandari

Nomor Mahasiswa : 14313079

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN SEKTOR UNGGULAN DI  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1  
Program Studi Ilmu Ekonomi,  
Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Indah Wulandari

Nomor Mahasiswa : 14313079

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERTANYAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 08 Desember 2021

Penulis



Indah Wulandari

**PENGESAHAN SKRIPSI**

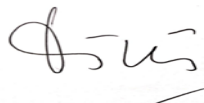
**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN SEKTOR UNGGULAN DI  
PROVINSI PAPUA BARAT**

Nama : Indah Wulandari  
Nomor Mahasiswa : 14313079  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Diana Wijayanti, S.E., M.Si.

# BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI  
PAPUA BARAT**

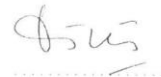
Disusun Oleh : **INDAH WULANDARI**

Nomor Mahasiswa : **14313079**

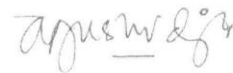
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 10 Januari 2022**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti,,S.E., M.Si.




Penguji : Agus Widarjono,Drs.,M.A., Ph.D.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

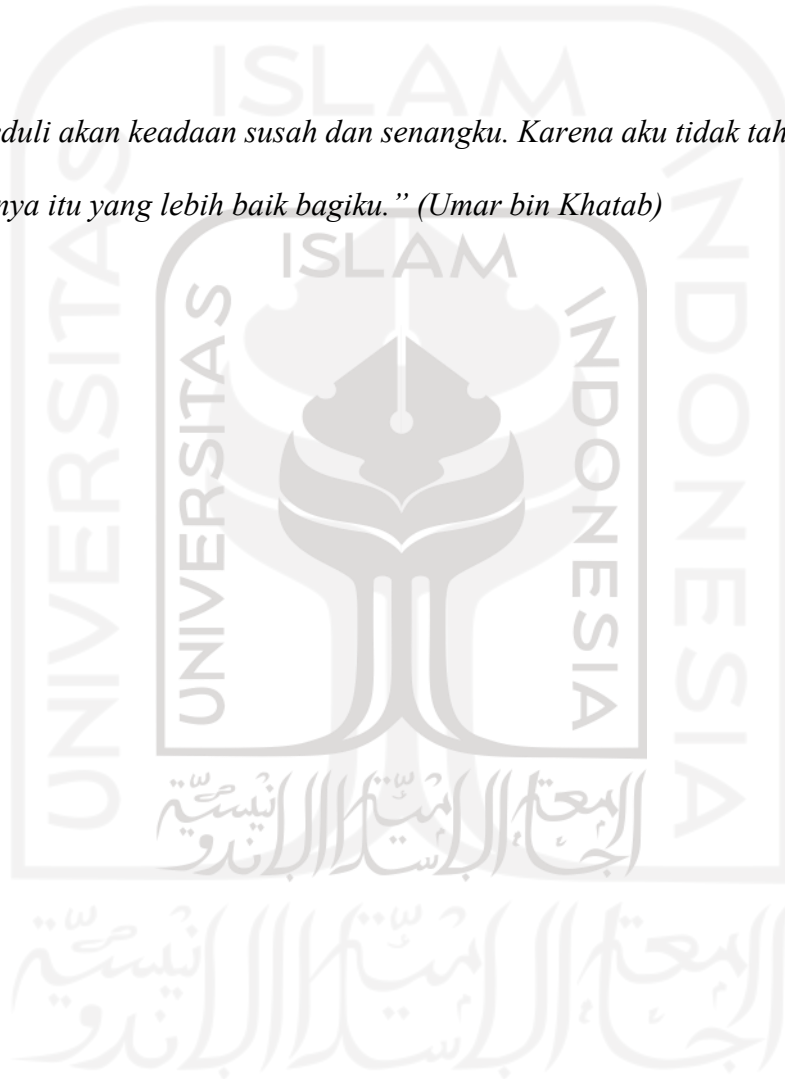


  
Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## MOTTO

*“ So you can throw me to the wolves, Tomorrow I will come back, Leader of the whole pack, Beat me black and blue, Every wound will shape me, Every scar will build my throne ”*  
(BMTH-Throne)

*“ Aku tidak peduli akan keadaan susah dan senangku. Karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku.” (Umar bin Khatab)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tiada henti yang selalu penulis panjatkan atas Ridho, Rahmat, dan Hidayah-Nya, serta kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu dan harapan yang telah terpenuhi. Skripsi yang telah ditulis ini, penulis persembahkan untuk:

1. Terima kasih kepada Allah SWT.
2. Terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW.
3. Terima kasih kepada ibu dan alm. bapak saya yang telah memberikan motivasi yang tinggi dalam menempuh perkuliahan hingga sampai pada tahap pengerjaan skripsi ini.
4. Untuk Ibu Diana Wijayanti yang telah memberikan bimbingan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Terimakasih kepada dosen-dosen dan staff Universitas Islam Indonesia Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang telah memberi pendidikan dan membantu saya selama proses belajar di FE UII.
6. Terima kasih kepada I Putu Gede Indra Pasek Putra yang terus membantu serta mendesak saya untuk segera lulus
7. Terima kasih kepada teman-teman saya Ray, Alif Ryan, dan Rio Marli (walau sekarang tidak ada kabarnya), yang senantiasa membantu dan memberi semangat.
8. Terimakasih kepada Muhammad Iqbal Aquamal yang membantu memberi semangat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Sektor Unggulan di Provinsi Papua Barat”, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan pihak-pihak terkait lainnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak kekurangan. Namun, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih banyak kekurangan. Namun, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya

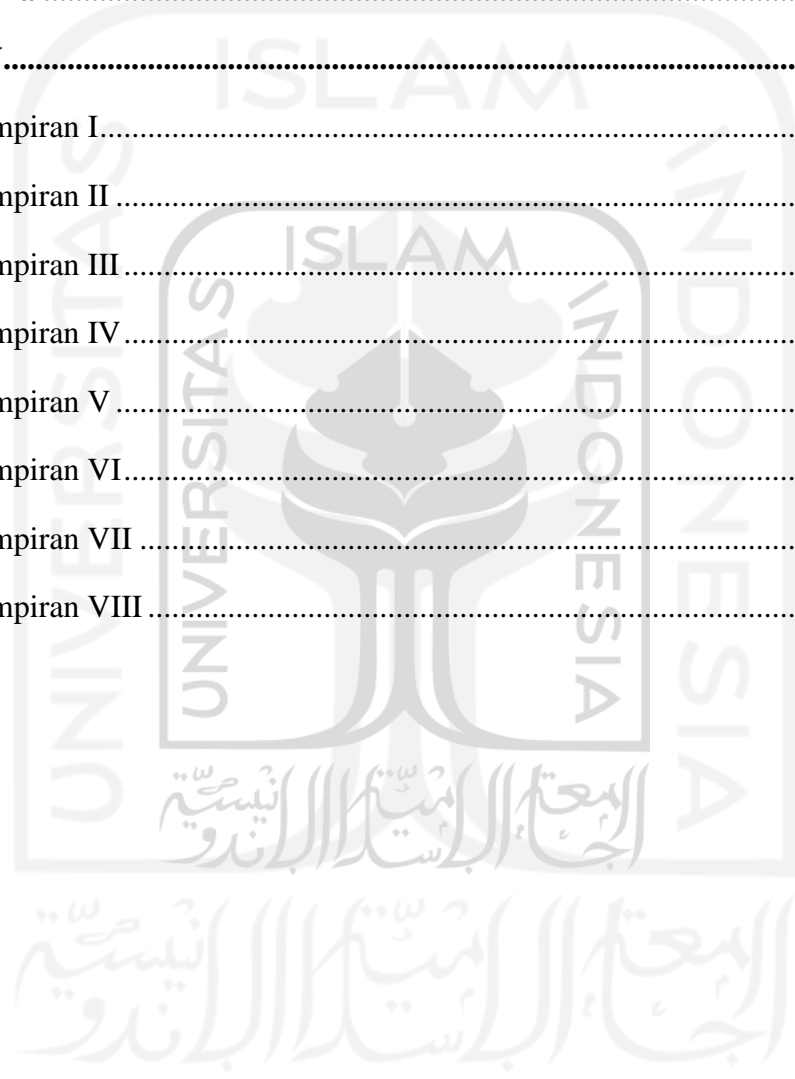


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PERTANYAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II .....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kajian Pustaka .....	6
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Pembangunan Ekonomi .....	10
2.2.2 Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah.....	13

2.2.3	Sektor Unggulan.....	15
2.2.4	Kriteria Penentuan Sektor Unggulan .....	18
2.2.5	Produk Domestik Regional Bruto.....	18
<b>BAB III.....</b>		<b>20</b>
<b>Metode Penelitian.....</b>		<b>20</b>
1.1	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.2	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	20
1.2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	20
1.2.2	Jumlah Penduduk .....	20
1.2.3	Sektor-Sektor Ekonomi .....	21
1.2.4	Ketimpangan Pendapatan .....	21
1.3	Metode Analisis Data .....	21
3.3.1	Mengukur Ketimpangan.....	21
1.3.1.1	Indeks Williamson .....	21
1.3.1.2	Indeks Entropi Theil.....	22
1.3.2	Identifikasi Sektor Unggulan .....	23
1.3.2.1	Indeks Location Quotient.....	23
1.3.2.2	Tipologi Klassen .....	24
1.3.2.3	Shift Share Analysis.....	25
<b>BAB IV.....</b>		<b>27</b>
<b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>27</b>
4.1	Deskripsi Data Penelitian .....	27
4.2	Hasil Indeks Williamson.....	27
4.3	Hasil Analisis Indeks Theil.....	29
4.4	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> .....	30
4.5	Hasil Analisis Tipologi Klassen.....	32
4.6	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> .....	35

<b>4.7 Keterkaitan Ketimpangan dan Sektor Unggulan Provinsi Papua Barat.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>41</b>
<b>KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>41</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>41</b>
<b>5.2 Implikasi.....</b>	<b>42</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>
Lampiran I.....	49
Lampiran II .....	50
Lampiran III .....	51
Lampiran IV .....	52
Lampiran V .....	61
Lampiran VI.....	69
Lampiran VII .....	70
Lampiran VIII.....	71



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Gini Indonesia Menurut Provinsi September 2018 .....	3
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Indeks Williamson .....	27
Tabel 4.2 Indeks Entropi Theil di Provinsi Papua Barat .....	29
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ) .....	31
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB .....	33
Tabel 4.5 Klasifikasi Sektor PDRB Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2020.....	34
Tabel 4.6 Analisis Shift Share Provinsi Papua Barat.....	37



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Laju Indeks Williamson di Provinsi Papua Barat	Error!	Bookmark not defined.	8
Grafik 4.2 Laju Indeks Entrophy Theil di Provinsi Papua Barat	.....		30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. PDRB Kabupaten dan Kota Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2020	49
Lampiran II. PDRB Seri 2010 Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2020	50
Lampiran III. PDB Seri 2010 Nasional Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2020	51
Lampiran IV. Perhitungan Indeks Williamson	52
Lampiran V. Indeks Entropy Theil	61
Lampiran VI. Data Indeks Location Quotien	69
Lampiran VII. Tipologi Klassen	70
Lampiran VIII. Analisis <i>Shift Share</i>	71

## ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan daerah menjadi salah satu isu dan masalah serius pada pembangunan ekonomi di Indonesia. Sejak dahulu perekonomian Indonesia hanya terpusat di beberapa daerah di Indonesia, salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga terjadi perbedaan kondisi demografis antar wilayah yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi tidak maksimal atau tidak merata, ketidakmerataan pembangunan inilah yang menjadi penyebab lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terutama di bagian wilayah Papua dan Papua Barat.

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, rencana pembangunan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi terhadap wilayah perencanaan dan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah perencanaan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki daerah. Sehingga perencanaan pembangunan suatu daerah diarahkan untuk mengelola sumber daya daerah sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah tersebut. Wilayah Papua Barat memiliki potensi dan sumber daya alam yang masih sangat baik, namun pertumbuhan ekonominya cukup rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui potensi atau dalam hal ini sektor unggulan yang ada di daerah tersebut, agar pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi unggulan yang ada guna meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

**Kata kunci: pembangunan ekonomi, ketimpangan daerah, sektor unggulan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya yang melimpah dalam berbagai aspek tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal. Indonesia yang tersebar dari wilayah barat sampai timur memiliki potensi-potensi tersendiri. Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakannya sendiri untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing melalui pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu aspek yang dilakukan pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Amanat terkait pembangunan ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, sehingga wajib pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat sejahtera. Pembangunan ekonomi yang dimaksud yaitu proses oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan membentuk pembangunan yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan dan keberlanjutan (Rustiadi et al., 2009).

Pelaksanaannya pembangunan dalam skala nasional maupun daerah yang terjadi telah menimbulkan masalah pembangunan yang rumit. Baransano et al. (2016) menjelaskan tentang pembangunan nasional di Indonesia yang terjadi lebih menggunakan pendekatan yang menekankan pada makro ekonomi, sehingga berpotensi dapat mengabaikan kesenjangan pembangunan di masing-masing daerah yang cukup tinggi.

Sumber daya dan investasi seringkali difokuskan di wilayah kota atau di daerah yang memiliki potensi sumber daya tinggi, sehingga di Indonesia masih terjadi isu ketimpangan pembangunan. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah memunculkan permasalahan dalam konteks makro yang dapat menjauhkan dari tujuan mulia untuk pemerataan pembangunan di setiap wilayah di Indonesia. Kesenjangan antar daerah yang begitu tinggi tinggi di kota dan daerah dikarenakan adanya situasi politik, desentralisasi fiskal, masalah aksesibilitas, diskriminasi etnik, kegagalan pasar, konsentrasi sumber daya



alam dan sebagainya (Lessman, 2011). Pembangunan ekonomi dijelaskan sebagai proses multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2009).

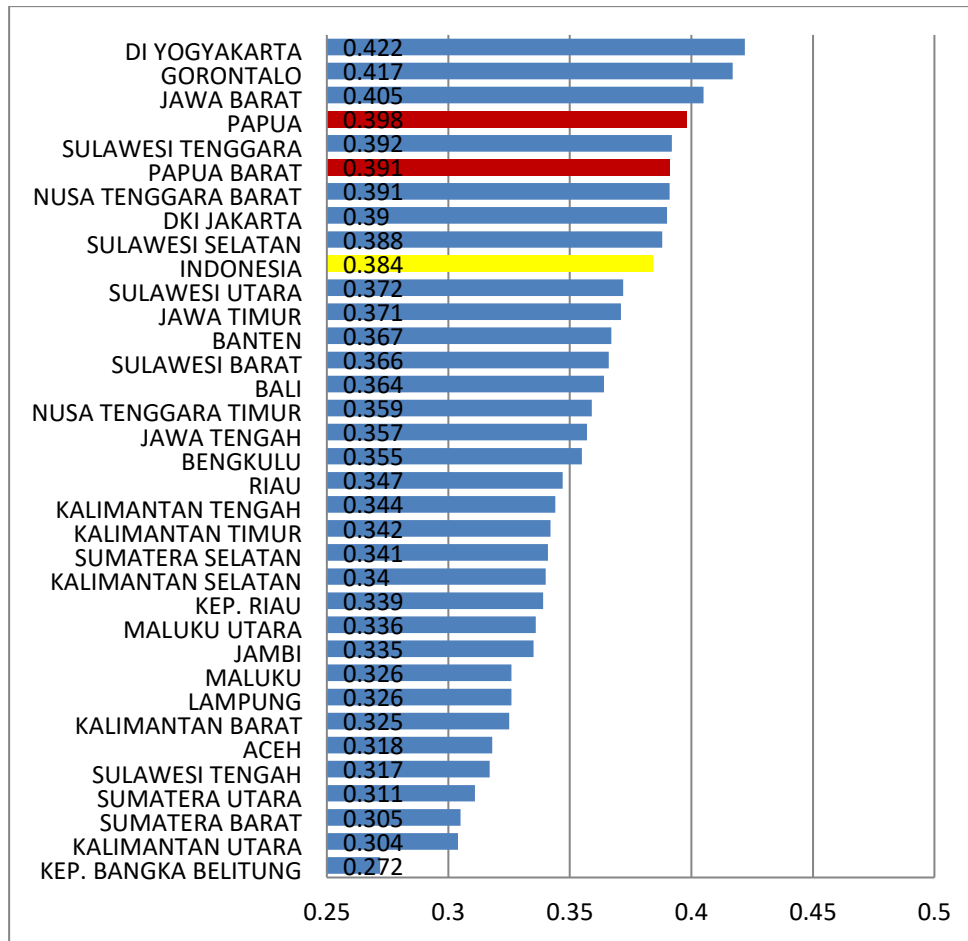
Pertumbuhan dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Peningkatan kemampuan ini disebabkan faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan investasi sehingga mengakibatkan bertambahnya produksi barang, modal, dan pengembangan teknologi. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan tenaga kerja sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka (Sukirno, 2011: 9-10). Selain pertumbuhan ekonomi, Todaro dan Smith (2009) juga menjelaskan mengenai ketimpangan sebagai permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Penelitian Mallarangang (2018) menjelaskan terjadi peningkatan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2011-2015.

Penelitian lain di wilayah Kalimantan Selatan oleh Maulana (2019) menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan yang mengkhawatirkan atau tinggi. Di sisi lain penelitian Luthfiah dan Tallo (2020) yang dilakukan di Provinsi Bali memiliki tingkat ketimpangan yang rendah. Hal ini menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan di wilayah Indonesia masih bervariasi, tetapi lebih cenderung masih memiliki ketimpangan yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan secara merata harus menjadi perhatian dengan mengonsentrasikan pada daerah-daerah dalam sektor perekonomian yang dikategorikan rendah atau bahkan tertinggal. Hal ini dapat mewujudkan pemerataan di masing-masing wilayah daerah yang ada di Indonesia.

Salah satu daerah yang menjadi sorotan dalam hal ketimpangan yaitu di wilayah Papua. Provinsi Papua dikenal dengan wilayah yang cukup luas dengan sumber daya alam yang melimpah, namun salah satu ketimpangan terbesar di Indonesia salah satunya adalah Papua Barat. Data yang diperoleh menunjukkan angka gini rasio di Papua Barat masih tergolong tinggi yaitu 0,391 jika dibandingkan dengan rata-rata rasio gini Indonesia sebesar 0,384. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk (DPR, 2020).

Tabel 1.1

Rasio Gini Indonesia Menurut Provinsi September 2018



Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya karena pembangunan ekonomi Indonesia sejak zaman dahulu (sejak zaman penjajahan Hindia-Belanda) banyak terpusat di daerah Jawa, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa saat itu cukup pesat jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, hal ini menyebabkan pembangunan ekonomi daerah-daerah yang berada di luar pulau Jawa menjadi tertinggal.

Salah satu faktor lainnya adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga terjadi perbedaan kondisi demografis antar wilayah yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi tidak maksimal atau tidak merata.

Ketidakmerataan pembangunan inilah yang menjadi penyebab lambatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terutama di bagian wilayah Papua Barat. Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, rencana pembangunan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi

terhadap wilayah perencanaan dan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah perencanaan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki daerah. Sehingga perencanaan pembangunan suatu daerah diarahkan untuk mengelola sumber daya daerah sehingga dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah tersebut (Yulianita, 2009).

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan (Hidayat dan Darwin, 2017: 157). Upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan perekonomian di suatu daerah adalah dengan menganalisis atau menggali sektor-sektor yang memang memiliki keunggulan komparatif maupun memiliki keunggulan kompetitif. Penelitian ini memfokuskan pada bahasan tentang masalah ketimpangan pembangunan dan untuk mengidentifikasi sektor unggulan yang berpotensi meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas, maka focus dalam penelitian ini adalah **“Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Sektor Unggulan Provinsi Papua Barat Tahun 2018”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Merujuk pada paparan latar belakang, diperoleh rumusan masalah yang menjadi bahasan penelitian ini:

1. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di provinsi Papua Barat?
2. Sektor manakah yang memiliki potensi sebagai sektor unggul dan memiliki daya saing dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah, berikut ini tujuan penelitian yang disebutkan pada poin-poin di bawah ini:

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat.
2. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi potensi unggul dan memiliki daya saing dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, berikut ini tujuan penelitian yang disebutkan pada poin-poin di bawah ini:

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat.
2. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi potensi unggul dan memiliki daya saing dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Papua Barat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

Fungsi dari adanya kajian pustaka sebagai referensi dalam memperkuat objektivitas penelitian ini. Berikut ini dijelaskan hasil dari penelitian sebelumnya tentang topik yang serupa, sehingga menjadi bahan kajian agar diperoleh sumber referensi yang memperkuat penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2012) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010”. Penelitian tersebut menggunakan tujuh alat analisis seperti indeks Williamson, entropi Theil, LQ, Shift Share, tipologi Klassen, Skalogram dan Overlay sebagai metode analisis. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa terjadi ketimpangan yang ada di Barlingmascakeb antara 2007 – 2010 dengan besaran indeks Williamson 0,185 dan nilai indeks entropi Theil sebesar 0,722. Kategori dari ketimpangan yang ada di Barlingmascakeb adalah rendah, meskipun terjadi trend peningkatan ketimpangan pada periode 2007 – 2010, yang jika tidak ditindaklanjuti dapat berpotensi menjadi ketimpangan tinggi. Ada beberapa sektor unggulan di wilayah Barlingmascakeb yaitu pada sektor jasa-jasa di wilayah Banjarnegara. Kemudian sektor bangunan, perdagangan, keuangan dan jasa-jasa cukup kuat di Purbalingga. Banyumas juga memiliki keunggulan di sektor bangunan, keuangan listrik gas dan air bersih. wilayah Kabupaten Cilacap memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Sektor unggulan pertambangan dan penggalian tinggi di Kebumen. Beberapa kabupaten memiliki infrastruktur daerah yang memadai salah satunya Cilacap dan Banyumas.

Penelitian dari Baransano *et al.* (2016) dengan judul “Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat”. Penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis seperti Indeks Theil, LQ dan Shift Share. Hasil dari alat analisis yang digunakan menunjukkan pembangunan yang ada di kabupaten Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat dan Fak-Fak berpengaruh pada tingginya ketimpangan di wilayah Papua Barat. Pada periode 2005 – 2013 menunjukkan PDRB Papua Barat masih didukung oleh sektor unggulan yang berasal dari pertanian. Rekomendasi yang diberikan dari penelitian ini yaitu masing-masing kabupaten menggali

setiap sektor unggulan yang ada sebagai alternatif pembangunan perekonomian. Hal ini dapat menjadi keunggulan baik kompetitif maupun komparatif sehingga menjadi penyokong pertumbuhan perekonomian di tingkat regional dan tentu akan meningkatkan perekonomian di wilayah Papua Barat.

Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Indeks Theil, Location Quotient dan *Shift Share Analysis* menunjukkan ketimpangan pembangunan yang terjadi disebabkan oleh ketimpangan di dalam wilayah pengembangan dan dipengaruhi oleh kabupaten Teluk Wondama, Sorong, Raja Ampat dan Fak-Fak. Hasil penelitian juga menunjukkan sektor pertanian masih memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan PDRB Papua Barat selama periode 2005-2013. Kami juga menemukan dan merekomendasikan bahwa sektor-sektor unggulan di setiap kabupaten/kota merupakan salah satu strategi alternatif bagi pemerintah daerah dalam memulai suatu perencanaan pembangunan, di mana keunggulan komparatif dan kompetitif dari sektor-sektor tersebut dapat berperan sebagai mesin pertumbuhan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pamrihnan dan Cahyadin (2016) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Identifikasi Sektor Bisnis antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Williamson Index, Theil Entropy Index, Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri cenderung menurun, tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi di Kecamatan Wonogiri dan tingkat ketimpangan pendapatan terendah terjadi di Kecamatan Eromoko. Indeks Entropy Theil menunjukkan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Wonogiri cenderung menurun. Kecamatan Karangtengah memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi sedangkan ketimpangan terendah adalah Kecamatan Purwatoro. Komposit LQ (SLQ dan DLQ) menunjukkan bahwa Sektor Pertanian; Listrik, Gas dan Air; Perdagangan dan Komunikasi menjadi sektor basis. Saran dari penelitian ini antara lain Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan jaringan komunikasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus mengembangkan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan.

Penelitian yang dilakukan Hidayat dan Darwin (2017) dengan judul “Analisis Sektor Unggulan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial dan merumuskan kebijakan pembangunan ke depan. Alat analisisnya adalah *Location*

*Quotient (LQ)*, *Shift Share Analysis (SSA)*, dan *Specialization Index*. Penelitian ini menggunakan data *time series* pada tahun 2010-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor-sektor potensial berdasarkan analisis gabungan dari *Location Quation*, Analisis *Shift Share*, dan Indeks Spesialisasi adalah sektor transportasi dan perdagangan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor industri pengolahan. sektor-sektor yang terspesialisasi dalam interaksi antar wilayah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor transportasi dan perdagangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mallarangang (2018) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2011-2015”. Penelitian ini menggunakan indeks Williamson dan indeks Theil untuk analisis data. Hasil penelitian berdasarkan analisis indeks Williamson, tingkat ketimpangan yang terjadi di atas nol, ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan analisis indeks tersebut telah terjadi peningkatan yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan, sektor industri memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jasa lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Boedi (2018) dengan judul “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Beberapa alat analisis seperti Tipologi Klassen, LQ dan GIS digunakan untuk menganalisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muara Enim dan Palembang masuk kategori daerah cepat maju dan tumbuh berdasarkan Tipologi Klassen. Selain itu, Komering Ulu menurut analisis LQ menjadi daerah dengan potensi sektor unggulan yang tinggi diantara wilayah lain di Sumatera Selatan, khususnya di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan; disusul dengan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Begitu juga dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi potensi. Sumatera Selatan berdasarkan Geographic Information System yang memiliki basis tinggi adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2019) dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kependudukan. Analisis Indeks Williamson dan Tipologi Klassen digunakan sebagai metode analisis untuk

memberikan gambaran tentang ketimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan masih mengkhawatirkan, ditunjukkan melalui Indeks Williamson menunjukkan tingkat sedang dan tinggi karena berkisar 0,5. Temuan penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah kabupaten yang memiliki ketergantungan besar terhadap pertambangan batu bara berada pada kuadran 2 (berpenghasilan tinggi tetapi pertumbuhan rendah) dan kuadran 4 (pertumbuhan rendah dan pendapatan rendah) berdasarkan hasil Tipologi Klassen.

Penelitian yang dilakukan Nur (2019) dengan judul “Analisis PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi DKI Jakarta”. Metode analisis data menggunakan Shift Share dan Location Quotient. Pada analisis Shift-Share 2011-2018 dan analisis Location Quotient (LQ) 2014-2018, saya memperoleh sektor ekonomi yang menghasilkan PDRB DKI Jakarta dan sektor basis tertinggi. Selanjutnya pemetaan sektor ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan PDRB terbesar di setiap elemen dan dapat dijadikan sebagai basis ekonomi di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Real Estate. Sektor ekonomi yang menghasilkan PDRB dan sektor basis tertinggi di DKI Jakarta umumnya terdapat di sektor tersier dan ada pula di sektor sekunder. Namun, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang merupakan jenis sektor sekunder justru menghasilkan nilai pertumbuhan PDRB tertinggi dalam analisis Shift Share diikuti oleh sektor Konstruksi yang juga merupakan sektor sekunder.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Farida (2020) dengan judul “Analisis Sektor Unggulan dan Perubahan Infrastruktur di Kabupaten/Kota Provinsi Banten”. Penelitiannya menggunakan *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* sebagai analisis data yang digunakan untuk memahami sektor-sektor yang memiliki potensi unggulan. Secara garis besar perhitungan LQ menunjukkan sektor jasa masih menjadi sektor unggulan/basis di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Sektor selanjutnya yang mendominasi yaitu sektor pertanian dan konstruksi. Hasil analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2013-2017 yang tidak terlalu signifikan namun dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan kontribusi luaran sektor ekonomi, perubahan sektor unggulan dan keterkaitan antar sektor ekonomi.

Penelitian yang dilakukan Luthfiyah dan Tallo (2020) dengan judul “Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2019”. Penelitian ini ditentukan dengan



metode analisis tipologi Klassen dan penentuan ketimpangan antar wilayah menggunakan Indeks Williamson. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Bali memiliki nilai ketimpangan Indeks Williamson 0.26 pada tahun 2019 yang menunjukkan nilai yang cukup baik dengan adanya penurunan tingkat ketimpangan ekonomi dibandingkan dengan penelitian di tahun sebelumnya. Pemerataan pembangunan tetap harus diperhatikan dengan memfokuskan pada wilayah dan sektor yang masih termasuk tertinggal atau terbelakang, sehingga proses pembangunan dapat terjadi pada semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pembangunan Ekonomi**

Fokus utama dalam pengembangan suatu daerah adalah mensejahterakan rakyat, salah satu jalannya menggaungkan pembangunan ekonomi yang menjadi sarana dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Anjani dan Farida (2020) memberikan penjelasan mengenai pembangunan ekonomi sebagai salah satu faktor penting dalam membangun perekonomian wilayah tersebut agar memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat terus bertumbuh dan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya.

Pembangunan dipaparkan sebagai proses multidimensi yang dapat mengakibatkan berubahnya karakteristik utama dari masyarakat, sebagai contoh adanya perubahan kondisi ekonomi, struktur sosial di masyarakat, sistem nilai yang terkandung pada masyarakat dan juga perekonomiannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi sebagai salah satu dari proses meningkatnya pendapatan per kapita secara riil dan berkelanjutan. Hal ini menurut Arsyad (2010: 177) dijelaskan sebagai salah satu proses yang menjadikan masyarakat memiliki peningkatan pendapatan per kapita secara berkelanjutan pada jangka waktu yang begitu panjang ditandai dengan perubahan struktur ekonomi dan semakin baik kelembagaan.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri (Nur, 2019: 352). Proses dalam pembangunan perekonomian di Indonesia bergantung pada kekayaan sumber daya alam, faktor

manusia, investasi, bisnis, dan teknologi sebagai unsur dari perekonomian. Akan tetapi, peningkatan pada ekonomi tidak bisa tercipta jika beberapa aspek seperti nilai moral, sikap budaya, lembaga sosial masyarakat dan kondisi perpolitikan di Indonesia tidak baik karena hal tersebut sebagai faktor non-ekonomi dari pembangunan ekonomi. Lebih lanjut Jhingan (2012: 338) menjelaskan mengenai tujuan utama dalam pembangunan ekonomi agar membangun infrastruktur modal dengan skala yang besar sehingga bisa meningkatkan produktivitas baik di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri.

Pembangunan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, usaha, teknologi sebagai faktor ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, sikap budaya, nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang sebagai faktor non ekonomi. Lebih lanjut tujuan pokok pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri (Jhingan, 2012: 338).

Menurut Arsyad (2010: 177) pembangunan ekonomi dibagi menjadi lima tahapan yaitu:

- 1) Tahapan masyarakat tradisional, dengan karakteristik kelompok masyarakat yang cenderung memiliki pola pikir sederhana, dengan produktivitas utamanya dari sektor pertanian dan masih cukup kecil. Sektor industri khususnya manufaktur masih relatif kecil. Karakteristik lainnya adalah tidak tentunya perubahan penduduk dan pendapatan per kapita riil penduduk masih kecil.
- 2) Tahapan prasyarat lepas landas, yang menjadi salah satu pondasi bagi masyarakat agar bersiap untuk melakukan pertumbuhan dengan upaya pribadi. Tujuannya adalah agar menciptakan pasar di tingkat nasional dan distribusi barang dan jasa yang semakin lancar, serta menciptakan teknologi khususnya di bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas komoditas. Hal ini sebagai langkah awal dalam pembangunan ekonomi menggunakan upaya sendiri.
- 3) Tahapan lepas landas, di mana pada tahap ini kondisi pertumbuhan ekonomi

mulai tinggi. Hal ini memicu revolusi di bidang politik, inovasi yang juga semakin tinggi dan membuka peluang pada pasar-pasar baru.

- 4) Tahapan menuju kedewasaan, yaitu terkait dengan pola pikir masyarakat yang berkembang menjadi dewasa, di mana teknologi sudah diterapkan dengan efektif pada berbagai macam aktivitas produksi. Masyarakat pada tahap ini memiliki karakteristik dengan tenaga kerja yang semakin terampil, dan peran-peran dari manajer sudah profesional dan mulai ada kritik pada sistem industrialisasi yang awalnya diinisiasi oleh masyarakat dengan intelektual tinggi.
- 5) Tahapan konsumsi tinggi, yaitu kesadaran pada kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian yang tinggi termasuk juga konsumsinya. Tahap ini mulai melebar karena sudah memiliki kekuasaan dan terus ingin ditingkatkan serta memperbesar aktivitas yang memberikan pengaruh pada negara luar, membuat program-program terkait pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan pendapatan melalui pajak progresif dan pajak konsumsi pada kategori barang dan jasa sekunder serta tersier.

Dijelaskan juga menurut Jhingan (2012: 41) bahwa terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi suatu negara dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi. Hal itu menjadi dasar yang disebutkan pada poin-poin berikut:

- 1) Atas dasar kekuatan sendiri, keinginan agar mengubah dalam arah yang lebih baik pada nasib dan inisiasi agar membuat peningkatan materi perlu timbul dari masyarakat dalam negara itu.
- 2) Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang mengakibatkan aktivitas faktor dan mempersulit pengembangan sektor dan pembangunan, hal ini tentu dibutuhkan perubahan pada lembaga sosial ekonomi.
- 3) Perubahan struktural, munculnya pergantian dari warga yang sebelumnya menggarap pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang meliputi peralihan lembaga, sikap sosial dan dorongan yang ada secara radikal.
- 4) Pembentukan modal, dijelaskan sebagai aspek utama dan strategis dalam proses pembangunan. Namun, penyediaan atau perbuatan investasi akan berakibat percuma jika tidak ada aspek lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 5) Kriteria investasi yang tepat yang dijelaskan sebagai tanggung jawab negara

agar menginisiasi permodalan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat, perlu diteliti dengan pertimbangan seluruh aspek-aspek dalam dinamika perekonomian.

- 6) Persyaratan sosial budaya, pengetahuan tentang sosial budaya warga perlu dirubah apabila pembangunan diharapkan bisa berlangsung. Peningkatan pendapatan nasional tidak dapat memberikan kenaikan kesejahteraan sosial, apabila kenaikan pendapatan tersebut tidak bisa dibarengi dengan penyesuaian budaya.
- 7) Administrasi, hadirnya administrasi yang profesional, berwibawa, dan tidak KKN sebagai *sine qua non* pembangunan ekonomi. Tidak adanya perlengkapan administratif yang efektif, maka tentu perencanaan pembangunan publik atau privat tidak bisa diselenggarakan dengan baik.

### **2.2.2 Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah**

Ketimpangan pendapatan dipaparkan sebagai masalah serius yang terjadi di setiap daerah. Masalah ketimpangan tersebut harus segera diatasi agar tidak semakin membesar (Pamrihnan dan Cahyadin, 2016:79). Ketimpangan pembangunan dijelaskan sebagai permasalahan pembangunan antar regional yang tidak sama. Hal ini sejalan dengan Mallarangang (2018: 21) bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Imtil beberapa bangsa, pemerataan pembangunan ekonomi yang tidak baik sudah menciptakan permasalahan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya, yang mengakibatkan sebagian besar negara memberikan arahan pada kebijakan pembangunan agar menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan di setiap wilayah (Todaro dan Smith, 2009). Menurut Rustiadi et al., (2009), aspek penting yang menjadikan ketimpangan tidak merata di Indonesia yaitu:

- 1) Geografi, pada daerah atau regional dengan luasan yang tinggi dapat terjadi variasi spasial kualitas dan kuantitas sumber daya mineral, sumber daya pertanian, topografi, iklim, curah hujan dan sebagainya. Apabila faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan perkembangan wilayahnya lebih baik.
- 2) Sejarah, tingkat perkembangan dari suatu masyarakat dalam suatu daerah

sangat tergantung pada apa yang telah dilakukan di masa lalu misalnya sebuah sistem yang memberikan kebebasan untuk bekerja dan berusaha akan mampu berkembang dengan lebih baik.

- 3) Politik, instabilitas politik sangat memengaruhi proses perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah.
- 4) Kebijakan pemerintah, adanya dominasi pemerintah dalam semua aspek pembangunan ekonomi akan menyebabkan tingginya tingkat ketimpangan pembangunan seperti yang dikemukakan juga oleh Kurian (2007). Sehingga Matsui (2005) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemerintah seharusnya memainkan peranan penting dalam mempromosikan aktivitas-aktivitas sektor swasta di dalam ekonomi regional suatu wilayah.
- 5) Administrasi, dijelaskan menurut Kimura (2007) pada hasil kajiannya bahwa marginalisasi administrasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara menyebabkan ketimpangan yang tinggi dengan wilayah Gorontalo sehingga memacu pembentukan Provinsi Gorontalo. Wilayah yang administrasinya efisien akan mampu mengundang investasi, karena perizinan tidak selalu rumit sebaliknya daerah dengan kinerja administrasi buruk (*bottleneck bureaucracy*) tidak diminati investor.
- 6) Sosial budaya, secara umum pada masyarakat dengan kondisi tertinggal tidak mempunyai institusi dan perilaku yang mendukung untuk pengembangan ekonominya.
- 7) Ekonomi, dijelaskan bahwa aspek-aspek ekonomi yang menjadi penyebab ketimpangan antar daerah, di antaranya bisa dikelompokkan berikut:
  - a) Faktor ekonomi yang memiliki hubungan antara perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan.
  - b) Faktor ekonomi yang memiliki hubungan antara akumulasi dari berbagai faktor.
  - c) Faktor ekonomi yang memiliki hubungan antara pasar bebas dan pengaruhnya pada *spread effect* dan *backwash effect*.
  - d) Faktor ekonomi yang memiliki hubungan antara distorsi pasar seperti *immobility*, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan tenaga kerja dan lainnya.

Membahas tentang pembangunan daerah, ada dua konsep tentang ketimpangan yang umum pada kajian empiris, yang pertama merupakan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok (ketimpangan vertikal), yang pengukurannya melalui Gini Rasio sebagai ukuran dari agregat ketimpangan dengan besaran angka antara 0 yang berarti pemerataan tinggi hingga nilai 1 yang berarti ketimpangan tinggi. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan antar daerah (ketimpangan horizontal). Berdasarkan kajian empiris-empiris yang dilakukan, masalah ketimpangan pembangunan antar daerah pertama kali digagas oleh Douglas C. North pada kajiannya terkait teori pertumbuhan neo-klasik yang isinya memunculkan pandangan adanya keterkaitan antara tingkat pembangunan ekonomi pada suatu negara dengan ketimpangan wilayah antar daerahnya di suatu negara tersebut (Baransano et al., 2016: 123-124).

Ukuran ketimpangan pembangunan wilayah dalam hal ini dapat diukur menggunakan beberapa indeks, seperti Indeks Williamson dan Theil. Indeks tersebut memiliki perbedaan dengan indeks Gini yang pada umumnya banyak digunakan dalam mengukur penyebaran pendapatan. Perbedaannya pada penggunaan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk yang menjadi input untuk dibandingkan, karena hal tersebut membandingkan ketimpangan daerah bukan ketimpangan antar kelompok miskin dan kaya. Lebih lanjut, penggunaan indeks Theil memberikan keunggulan dibandingkan indeks Williamson pada ukuran ketimpangan wilayah. Keunggulannya pada kemampuan menghitung ketimpangan di dalam daerah dan antar daerah secara bersamaan, hal ini membuat cakupan analisisnya menjadi lebih luas. Selain itu, indeks Theil juga bisa menghitung nilai kontribusi dalam bentuk persentase setiap daerah pada tingkat ketimpangan di wilayah secara umum, sehingga bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik tentang kondisi daerah. Indeks Theil juga memiliki cara perhitungan yang sama di mana ketika semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan menjadi sangat tinggi, begitu juga sebaliknya apabila mendekati 0 maka ketimpangan rendah atau lebih merata. (Baransano *et al.*, 2016: 124).

### **2.2.3 Sektor Unggulan**

Sektor unggulan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai tumpuan harapan pembangunan

ekonomi. Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek atau karakteristik dari suatu perekonomian (Departemen Pertanian [Deptan], 2005). Sektor unggulan juga dijelaskan sebagai sektor yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan memiliki tujuan untuk mengembangkan produksi yang dihasilkan oleh potensi yang dimiliki daerah. Sektor unggulan tersebut bukan hanya mampu untuk memenuhi permintaan dari dalam daerahnya saja namun juga mampu untuk memenuhi permintaan dari luar daerahnya (Anjani dan Farida, 2020:149).

Di Indonesia pembangunan ekonomi secara umum dibagi ke dalam sembilan sektor dan untuk mengembangkan semua sektor tersebut secara bersamaan diperlukan investasi yang sangat besar. Jika modal (investasi) tidak cukup maka perlu ada penetapan prioritas pembangunan. Biasanya sektor yang mendapat prioritas tersebut adalah sektor unggulan yang diharapkan dapat mendorong (*push factor*) sektor-sektor lain untuk berkembang menjadi pendorong utama (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah (Baransano et al., 2016). Kebijakan perekonomian setiap daerah memiliki perbedaan struktur ekonomi yang menentukan sektor unggulan sesuai dengan kemampuan dan letak wilayah. Sektor unggulan dapat dipilih dari sektor dasar yang ada pada masing-masing daerah dalam pengembangan wilayah. Peran dalam pasar pengiriman keluar daerah dapat terus berkembang dengan permintaan tanpa batas, sehingga dapat meningkatkan perekonomian serta perekrutan tenaga kerja dalam jumlah besar (Luthfiyah dan Tallo, 2020: 241).

Kriteria sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah, di antaranya : pertama, sektor unggulan tersebut memiliki laju tumbuh yang tinggi; kedua, sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; ketiga, sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang; keempat, dapat juga diartikan sebagai sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Sambodo dalam Hajeri *et al.*, 2015).

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor

pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. (Rachbini, 2001).

Penentuan sektor unggulan dapat didasarkan pada kriteria sebagai berikut: (1) *share* terhadap PDRB: suatu sektor dikatakan unggul jika memberikan kontribusi minimal 10%, sedangkan sub sektor minimal 2.5%, (2) nilai LQ (*Location Quotient*): sektor/sub sektor dikatakan unggul jika mempunyai nilai  $LQ > 1$ , (3) pertumbuhan PDRB: suatu sektor dikatakan unggul jika mengalami rata-rata pertumbuhan minimal 5% per tahun dan terus mengalami pertumbuhan positif setidaknya pada tiga tahun atau mengalami kenaikan pada dua tahun terakhir secara berturut-turut, (4) selisih antara pertumbuhan *share* sektor/sub sektor terhadap PDRB wilayah kajian dan wilayah yang lebih besar bernilai positif (Baransano et al., 2016).

Metode LQ dan SSA (*Shift Share Analysis*) merupakan dua metode yang sering dipakai sebagai indikator sektor basis. Metode LQ digunakan untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikasi sektor basis dan non basis serta merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu wilayah. Asumsi dalam LQ adalah terdapat sedikit variasi dalam pola pengeluaran secara geografi dan produktivitas tenaga kerja seragam serta masing-masing industri menghasilkan produk atau jasa yang seragam. *Shift Share Analysis* (SSA) merupakan salah satu dari sekian banyak teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktivitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan dengan suatu referensi cakupan wilayah yang lebih luas dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil SSA juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (*competitiveness*) aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Hasil SSA juga mampu menjelaskan kinerja (*performance*) suatu aktivitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerja yang dihasilkan di dalam wilayah total.



#### **2.2.4 Kriteria Penentuan Sektor Unggulan**

Menurut Rachbini (2001) ada lima syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.
5. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

#### **2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi (Restiatun, 2009:79).

PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2019). Adapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni: usaha meratakan pembangunan di seluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarahannya pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar

supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna mengokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Saputri dan Boedi, 2018: 219).

Konsep mengenai PDRB yaitu semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Sutrisno, 2012: 43). Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Tarigan, 2007):

- 1. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)**, yaitu pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan regional dengan menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah. Total penyediaan barang dan jasa dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok dan ekspor neto (ekspor-impor).
- 2. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)**, yaitu perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Maka itu, untuk menghitung pendapatan regional berdasarkan pendekatan produksi, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor.
- 3. Pendekatan Penerimaan (*Income Approach*)**, dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Jadi yang dijumlahkan adalah: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **1.1 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian tentang ketimpangan pembangunan dan sektor unggulan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang juga sebagai pendekatan empiris pada pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Metode kuantitatif memiliki data yang dilakukan proses atau diolah sehingga lebih mudah diinterpretasikan sebagai informasi penting pada pengambilan keputusan. Urutan dalam penelitian kuantitatif ini berawal dari rumusan masalah, penyusunan model riset, perolehan data, membuat solusi, analisis hasil data yang diperoleh, serta proses implementasi hasil (Mudrajad, 2009).

#### **1.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional dijelaskan sebagai informasi tentang bagaimana mengukur variabel dan memberikan informasi agar peneliti lainnya dengan variabel yang sama. Variabel yang dipergunakan yaitu PDRB kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, Jumlah Penduduk, Sektor-Sektor Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan. Definisi operasional setiap variabel dijelaskan pada sub bab berikutnya:

##### **1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sejumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dalam penelitian ini menggunakan PDRB atas Dasar Harga Konstan. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik. Satuan yang digunakan dalam data ini adalah miliar rupiah.

##### **1.2.2 Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik. Satuan yang digunakan dalam data ini adalah ribu jiwa.

### 1.2.3 Sektor-Sektor Ekonomi

Merupakan lapangan usaha yang terdapat pada PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Bangunan dan konstruksi
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Jasa-jasa

### 1.2.4 Ketimpangan Pendapatan

Dalam penelitian ini, wilayah yang dimaksud merupakan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Tingkat ketimpangan diukur berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, dengan besaran antara 0 sampai 1.

## 1.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur ketimpangan dan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Provinsi Papua Barat. Ketimpangan diukur menggunakan indeks Williamson dan Entropi Theil. Untuk identifikasi sektor unggulan digunakan *Location Quotient*, Tipologi Klassen dan *Shift Share Analysis*. Berikut merupakan penjelasan mengenai analisis data yang digunakan.

### 3.3.1 Mengukur Ketimpangan

Analisis pertama yang dilakukan yaitu mengukur ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Ketimpangan di Provinsi Papua Barat menggunakan data PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga konstan periode 2014-2020. Analisis yang digunakan yaitu indeks *Williamson* dan *Entropy Theil*.

#### 1.3.1.1 Indeks Williamson

Penggunaan indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB per kapita.

Selain itu Indeks Williamson menurut BPS berguna untuk mengetahui kesenjangan pembangunan dengan menggunakan angka PDRB. Kesenjangan atau ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis dari pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Indeks Williamson digunakan pada penelitian ini untuk mengukur seberapa besar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Berikut persamaan dari Indeks Williamson:

$$IW = \sqrt{\sum \frac{(Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}{Y}}$$

### 1.3.1.2 Indeks Entropi Theil

Selain menggunakan indeks Williamson, mengukur ketimpangan pembangunan di Papua Barat dapat dengan Indeks Entropi Theil. Indeks ini dijelaskan sebagai mengaplikasikan konsep / teori / informasi untuk melakukan pengukuran pada ketimpangan dan sektor-sektor perekonomian yang memberikan kontribusi pada PDRB dan tentu kesenjangan pendapatan antar daerah. Berikut rumusnya (Ying, 2000).

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log \log [(y_j/Y)/x_j/x]$$

Di mana:

- $I(Y)$  = Indeks entropi Theil
- $y_j$  = PDRB per kapita kabupaten/kota j
- $Y$  = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi Papua Barat
- $X_j$  = Jumlah penduduk kabupaten/kota j
- $X$  = Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat

Persamaan tersebut akan menghasilkan nilai indeks Entropi Theil yang memiliki indikator bahwa apabila semakin besar nilai indeks entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata terjadinya pembangunan. Nilai indeks Entropi Theil dihitung berdasarkan total nilai PDRB setiap sektor dan jumlah penduduk dari data berdasarkan atas harga konstan tahun 2010.

### 1.3.2 Identifikasi Sektor Unggulan

Analisis selanjutnya yang dilakukan untuk mengidentifikasi sektor perekonomian unggulan di Provinsi Papua Barat. Sektor unggulan di Provinsi Papua Barat menggunakan data PDRB per sektor atas dasar harga konstan periode 2010-2020. Analisis yang digunakan yaitu Location Quotient, Tipologi Klassen dan Shift Share Analysis.

#### 1.3.2.1 Indeks Location Quotient

Indeks LQ atau singkatan dari Location Quotient ini dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa jauh konsentrasi dari sektor-sektor ekonomi di daerah yang menjadi basis atau sektor utama. Secara umum, indeks LQ ini memberikan informasi tentang perbandingan secara relatif pada masing-masing sektor dalam kemampuannya untuk dibandingkan dengan sektor yang serupa di wilayah yang lebih besar cakupannya sebagai rujukan. Hasil dari LQ memberikan ukuran pada jumlah tenaga kerja per sektor ekonomi, jumlah produksi atau satuan lain yang digunakan sebagai kriteria (Dinc, 2002).

$$LQ_i = \frac{E_{ir}/E_r}{E_{in}/E_n}$$

Di mana:

$LQ_i$  = Location Quotient sektor i di Provinsi Papua Barat

$E_{ir}$  = PDRB sektor i di Provinsi Papua Barat

$E_r$  = PDRB total di Provinsi Papua Barat

$E_{in}$  = PDRB sektor i di tingkat nasional n

$E_n$  = PDRB total nasional n

Interpretasi nilai LQ dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jika  $LQ > 1$ , sektor i pada daerah r merupakan sektor unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah r lebih besar dari nasional n.
2. Jika  $LQ = 1$ , sektor i pada daerah r merupakan sektor andalan dengan

tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah  $r$  sama dengan dari nasional  $n$

3. Jika  $LQ < 1$ , sektor  $i$  pada daerah  $r$  merupakan sektor bukan unggulan dengan tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah  $r$  lebih kecil dari nasional  $n$ .

Analisis dengan menggunakan LQ akan dapat diketahui sektor-sektor perekonomian yang merupakan sektor unggulan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

### 1.3.2.2 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen digunakan untuk menganalisis klasifikasi sektor perekonomian di Provinsi Papua Barat. Salah satu cara yaitu dengan menetapkan rata-rata dari pertumbuhan perekonomian daerah menjadi sisi vertikal, dan untuk pendapatan per kapita menjadi sisi horizontal, maka dapat mengamati klasifikasi sektor menjadi empat kategori sebagai berikut (Kuncoro, 2010)

#### 1. Sektor maju dan tumbuh pesat (*Developed Sector*)

Sektor maju dan tumbuh pesat di mana memiliki laju pertumbuhan dalam PDRB daerah lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, serta memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

#### 2. Sektor maju tapi tertekan (*Stagnant Sektor*)

Sektor Maju Tapi Tertekan di mana memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih kecil dibanding laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

#### 3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*Developing Sector*)

Sektor potensial atau masih bisa dapat berkembang di mana mempunyai peningkatan pertumbuhan PDRB lebih tinggi apabila berbanding dengan peningkatan pertumbuhan PDRB di daerah yang menjadi rujukan, namun mempunyai nilai kontribusi sektor pada PDRB yang lebih kecil

dibandingkan kontribusi sektor itu terhadap PDRB daerah yang menjadi rujukan.

#### 4. Sektor Relatif Tertinggal (*Underdeveloped Sector*)

Sektor relatif tertinggal di mana mempunyai nilai pertumbuhan PDRB lebih kecil apabila berbanding dengan laju pertumbuhan PDRB di daerah yang menjadi rujukan, dan memiliki besaran kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibanding kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi rujukan

#### Pengelompokan Sektor Perekonomian Berdasarkan Tipologi

##### Klassen

Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	Laju Pertumbuhan di Atas Rata-Rata	Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-Rata
Pendapatan Per Kapita di Atas Rata-Rata	Sektor maju dan tumbuh pesat	Sektor maju tapi tertekan
Pendapat Per Kapita di bawah Rata-Rata	Sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat	Sektor relatif tertinggal

#### 1.3.2.3 Shift Share Analysis

*Shift Share Analysis* dijelaskan sebagai suatu teknik analisis data agar mengetahui potensi dari produksi sektoral di suatu daerah tertentu dengan membandingkannya dengan daerah referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Dengan menggunakan analisis SS adalah agar melihat apakah terjadi perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan sektor nasional. Hasil dari analisis SS ini memberikan informasi mengenai kinerja setiap sektor ekonomi dalam kontribusinya pada PDRB Papua Barat.

Proses analisis yang digunakan agar mengetahui sektor ekonomi apa yang memiliki daya saing dengan komoditas yang sama di tingkat Nasional dan apakah sektor itu bisa memberikan kontribusi pada PDRB Papua Barat.



Berikut rumus menurut Soepono dalam (Hajeri, Yurisinthae dan Dolorosa, 2015) persamaan dan komponen-komponennya dalam analisis *shift share* adalah

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Di mana:

- $D_{ij}$  = Perubahan sektor i di Provinsi Papua Barat  
 $N_{ij}$  = Pertumbuhan Provinsi i di Provinsi Papua Barat  
 $M_{ij}$  = Bauran industri sektor i di Provinsi Papua Barat  
 $C_{ij}$  = Keunggulan kompetitif sektor i di Provinsi Papua Barat  
i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti  
j = Variabel daerah yang diteliti (Provinsi Papua Barat)

Berdasarkan persamaan di atas, untuk mencari nilai masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

$$N_{ij} = E_{ij} - r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij}(r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh persamaan *shift share* untuk sektor i di Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

$$D_{ij} = E_{ij} \times r_n + E_{ij}(r_{in} - r_n) + E_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

Hasil analisis yang dapat digambarkan pada metode *shift share* dijelaskan sebagai berikut:

$N_{ij} +$  berarti pertumbuhan Papua Barat > Nasional

$M_{ij} +$  berarti sektor tertentu di Papua Barat > sektor di Nasional

$C_{ij} +$  berarti sektor i memiliki keunggulan kompetitif

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam kajian terkait dengan ketimpangan pembangunan dan sektor unggulan di Provinsi Papua Barat menggunakan data panel dengan jenis data sekunder, yang terdiri dari bentuk data *time series* antara 2010-2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode Indeks Theil, *Location Quotient*, Tipologi Klassen dan *Shift Share Analysis*.

#### 4.2 Hasil Indeks Williamson

Penggunaan indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB per kapita. Selain itu Indeks Williamson menurut BPS berguna untuk mengetahui kesenjangan pembangunan dengan menggunakan angka PDRB. Kesenjangan atau ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis dari pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Indeks Williamson digunakan pada penelitian ini untuk mengukur seberapa besar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. Nilai Indeks Williamson dengan menggunakan data PDRB Per kapita dan jumlah penduduk tiap kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2014-2020.

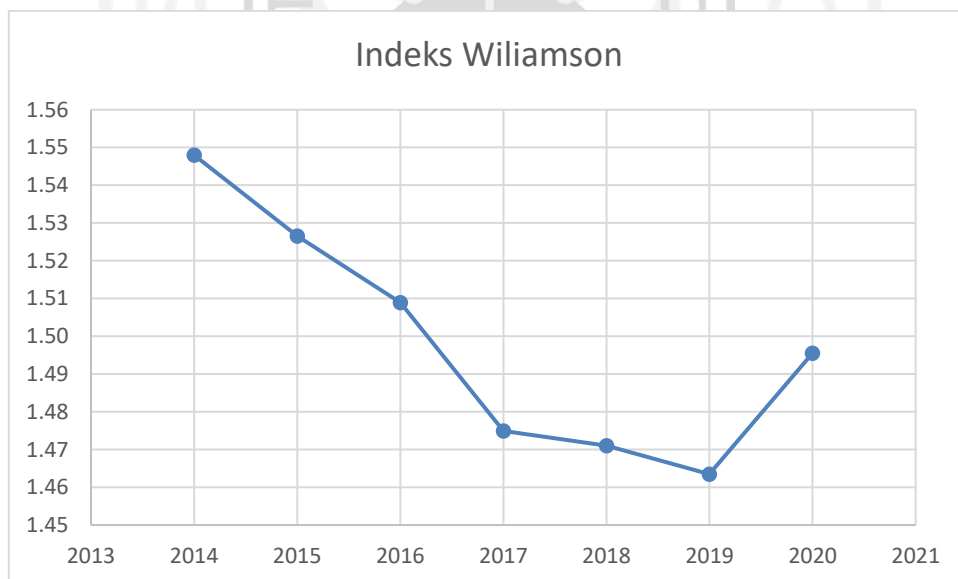
**Tabel 4.1**  
**Hasil Perhitungan Indeks Williamson**

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2014	1.55	Tinggi
2015	1.53	Tinggi
2016	1.51	Tinggi
2017	1.47	Tinggi
2018	1.47	Tinggi
2019	1.46	Tinggi
2020	1.50	Tinggi
Rata-Rata	1.50	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata ketimpangan PDRB per kapita antar Provinsi di Papua Barat selama 2014-2020 mencapai 1,50. Ketimpangan antar

kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tergolong tinggi, dan mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2014-2020. Pada tahun 2014 ke 2015 dan 2016 Indeks Williamson mengalami penurunan 0,02 per tahunnya, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,04 menjadi 1,47. Kemudian di tahun 2018 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan dan pada tahun 2019 menurun 0,01 dan melonjak naik pada tahun 2020 sebesar 0,04. Kenaikan angka Indeks Williamson pada tahun 2020 ini dimungkinkan terkena imbas dari pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada sektor perekonomian.

Secara umum nilai Indeks Williamson Provinsi Papua Barat selama periode 2014-2020 mengalami kecenderungan menurun, meskipun adanya pandemi membuat peningkatan kembali Indeks Williamson pada tahun 2020. Nilai indeks Williamson di Provinsi Papua Barat apabila dilihat secara rata-rata mengalami ketimpangan yang relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai kesenjangan yang terjadi antar kabupaten/kota di Papua Barat yang fluktuatif.



**Grafik 4.1**

**Laju Indeks Williamson di Provinsi Papua Barat  
Tahun 2014-2020**

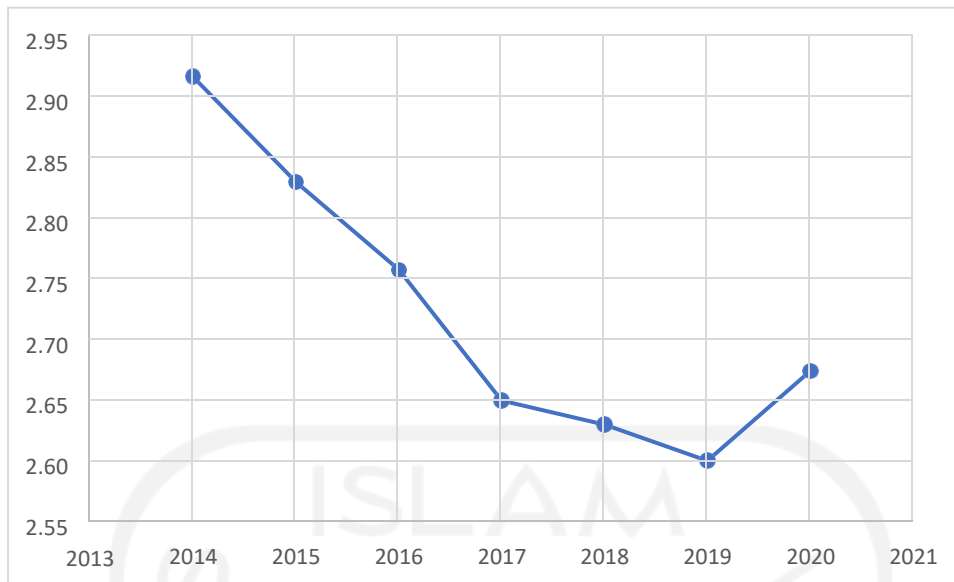
### 4.3 Hasil Analisis Indeks Theil

Penggunaan Indeks Theil pada kajian ini agar menghitung dan mengetahui ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua Barat. Indeks Theil mempunyai keunggulan untuk menghitung ketimpangan dalam daerah dan antar daerah secara bersamaan, yang mengakibatkan tingkatan analisisnya menjadi lebih luas. Indeks Theil juga dapat menghitung kontribusi (dalam persentase) masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah secara keseluruhan, sehingga memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. Nilai indeks Theil Provinsi Papua Barat berdasarkan kurun waktu 2014 hingga 2020.

**Tabel 4.2**  
**Indeks Entropi Theil di Provinsi Papua Barat**  
**Tahun 2014-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Entropi Theil</b>
2014	2,92
2015	2,83
2016	2,76
2017	2,65
2018	2,63
2019	2,60
2020	2,68
Rata-rata	2,72

Pada Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa indeks Entropi Theil dari tahun 2014 hingga 2020 memiliki ketimpangan tinggi. Tren menurun dialami pada tahun 2014 hingga 2019, dimana dari 2,92 pada 2014 menjadi 2,60 pada tahun 2019. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 2,68. Adapun rata-rata dari nilai Indeks Entropi Theil sebesar 2,72. Maka dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Papua Barat sangat tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua Barat memiliki distribusi pendapatan yang relatif tidak merata, dengan kata lain ketimpangan atau disparitas pendapatannya tinggi.



**Grafik 4.2**  
**Laju Indeks Entropy Theil di Provinsi Papua Barat**  
**Tahun 2014-2020**

#### **4.4 Hasil Analisis *Location Quotient***

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui suatu potensi ekonomi di Provinsi Papua Barat. Menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ) juga dapat menentukan suatu sektor yang dijadikan unggulan dari sisi kontribusinya, sehingga dapat mengetahui bagian komoditas ekspor pada suatu daerah. Metode ini diperoleh dengan cara membandingkan kontribusi pada sektor di suatu Provinsi Papua Barat terhadap total *output* keseluruhan dengan kontribusi suatu sektor yang sama terhadap total *output* di tingkat Nasional. Di mana sektor basis yang mempunyai nilai  $LQ > 1$ , dan sedangkan sektor non basis mempunyai nilai  $LQ < 1$ .

**Tabel 2.3**  
**Hasil Perhitungan Location Quotient (LQ)**  
**Dengan Indikator PDRB Harga Konstan Provinsi Papua Barat 2010-2020**

Sektor	Tahun											Rata-Rata LQ
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	0,80	0,74	0,75	0,75	0,78	0,79	0,80	0,81	0,78	0,80	0,79	0,78
2	2,44	2,42	2,31	2,26	2,13	2,15	2,19	2,14	2,21	2,22	2,22	2,25
3	1,65	1,60	1,54	1,51	1,50	1,42	1,30	1,28	1,33	1,29	1,30	1,43
4	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,03
5	1,27	1,23	1,25	1,20	1,21	1,21	1,23	1,23	1,18	1,16	1,15	1,21
6	0,80	0,92	1,06	1,19	1,26	1,35	1,43	1,47	1,44	1,48	1,43	1,26
7	0,35	0,37	0,37	0,38	0,40	0,43	0,46	0,49	0,50	0,53	0,57	0,44
8	0,47	0,48	0,53	0,56	0,61	0,64	0,67	0,68	0,67	0,71	0,69	0,61
9	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,23	0,19
10	0,35	0,33	0,34	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31
11	0,26	0,28	0,32	0,36	0,38	0,39	0,37	0,37	0,36	0,37	0,38	0,35
12	0,30	0,30	0,32	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,42	0,43	0,43	0,37
13	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
14	1,65	1,90	2,27	2,34	2,47	2,66	2,92	3,06	2,97	2,97	3,05	2,57
15	0,70	0,70	0,67	0,68	0,74	0,72	0,73	0,75	0,71	0,72	0,68	0,71
16	0,70	0,72	0,72	0,66	0,64	0,64	0,68	0,68	0,66	0,64	0,63	0,67
17	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,16	0,16

Keterangan: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estate; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ pada Tabel 4.3 menjelaskan Provinsi Papua Barat memiliki keunggulan atau basis dalam sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan rata-rata LQ sebesar 2,57 ( $LQ > 1$ ); pertambangan dan penggalian dengan rata-rata LQ 2,25 ( $LQ > 1$ ); Industri pengolahan dengan rata-rata LQ 1,43 ( $LQ > 1$ ); konstruksi dengan rata-rata LQ 1,26 ( $LQ > 1$ ); dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan rata-rata LQ 1,21 ( $LQ > 1$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki nilai yang cukup baik terhadap perekonomian di Provinsi Papua Barat, sektor di atas merupakan sektor yang telah mampu memenuhi kebutuhan pasarnya dan berpotensi memenuhi kebutuhan daerah lain atau

bahkan ekspor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat.

Beberapa sektor di Provinsi Papua Barat juga masuk kategori non basis, di mana memiliki kontribusi yang minim pada pertumbuhan ekonomi. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki rata-rata LQ 0,03 ( $LQ < 1$ ), di mana ini menjadi sektor di Provinsi Papua Barat yang memiliki nilai LQ terendah dibandingkan sektor lainnya. Sektor jasa perusahaan juga termasuk dalam kategori rata-rata LQ terendah di mana hanya diperoleh nilai sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan yang ada di Provinsi Papua Barat.

#### **4.5 Hasil Analisis Tipologi Klassen**

Analisis Tipologi Klassen berguna untuk melihat seberapa besar suatu sektor memberikan kontribusi terhadap total kontribusi sektor-sektor yang ada. Analisis ini juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat pertumbuhan rata-rata sektor tersebut, dengan kata lain untuk melihat perkembangan suatu sektor. Analisis Tipologi Klassen didasarkan pada analisis laju pertumbuhan (G) dan kontribusi (S) sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas melalui perhitungan PDRB. Pada penelitian ini PDRB Provinsi Papua Barat yang dibandingkan dengan PDB Nasional.

**Tabel 4.4**  
**Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB**  
**Provinsi Papua Barat dan PDB Nasional tahun 2010-2020**

Sektor	Data Nasional		Data Provinsi Papua Barat		Kuadran
	Rata-Rata Pertumbuhan (Gs)	Rata-Rata Distribusi (Sk)	Rata-Rata Pertumbuhan (Gsi)	Rata-Rata Distribusi (Ski)	
1	0,037	13,85%	0,064	10,81%	3
2	0,010	9,31%	0,026	21,00%	1
3	0,046	20,06%	0,048	28,65%	1
4	0,042	1,12%	0,136	0,04%	3
5	0,049	0,09%	0,065	0,11%	1
6	0,056	10,29%	0,151	12,99%	1
7	0,042	14,25%	0,123	6,26%	3
8	0,051	4,09%	0,124	2,51%	3
9	0,042	3,15%	0,104	0,59%	3
10	0,098	4,98%	0,113	1,56%	3
11	0,067	4,08%	0,140	1,43%	3
12	0,051	3,12%	0,117	1,15%	3
13	0,071	1,75%	0,088	0,11%	3
14	0,035	3,71%	0,130	9,44%	1
15	0,057	3,26%	0,082	2,31%	3
16	0,079	1,15%	0,096	0,77%	3
17	0,070	1,74%	0,097	0,28%	3

Keterangan: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. Real Estate; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 17. Jasa Lainnya.

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perbandingan tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Papua Barat ke dalam Kuadran Tipologi Klassen. Untuk mengetahui tingkat suatu sektor ekonomi di Provinsi Papua Barat dan Nasional terhadap sektor yang sama. Di mana sektor yang memiliki laju pertumbuhan rata-rata paling besar terhadap PDRB di Provinsi Papua Barat adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 15,1 persen, sedangkan sektor yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan



terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 2,6 persen. Berkaitan dengan kontribusi sektor yang memiliki kontribusi rata-rata paling terbesar pada PDRB Provinsi Papua Barat adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 28.65 persen, dan kontribusi rata-rata paling terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 0.04 persen.

Berdasarkan perhitungan analisis Tipologi Klassen pada Tabel di atas menjelaskan bahwa Provinsi Papua Barat hanya masuk pada dua kategori kuadran, yaitu sektor maju dan tumbuh pesat (Kuadran I) dan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Berikut sektor-sektor yang masuk pada klasifikasi kuadran di Provinsi Papua Barat.

**Tabel 4.5**  
**Klasifikasi Sektor PDRB Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2020**  
**Berdasarkan Tipologi Klassen**

<p><b>Kuadran I</b> <b>Gsi &gt; Gs dan Ski &gt; Sk</b></p> <p>Sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib</p>	<p><b>Kuadran II</b> <b>Gsi &lt; Gs dan Ski &gt; Sk</b></p> <p>-</p>
<p><b>Kuadran III</b> <b>Gsi &gt; Gs dan Ski &lt; Sk</b></p> <p>Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya.</p>	<p><b>Kuadran IV</b> <b>Gsi &lt; Gs dan Ski &lt; Sk</b></p> <p>-</p>

Berdasarkan klasifikasi Tipologi Klassen selama tahun 2010-2020 bahwa sektor yang dapat dikategorikan sektor yang maju dan tumbuh pesat (Kuadran I) adalah sektor

pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Provinsi Papua Barat memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor di tingkat nasional.

Terdapat 12 yang masuk pada sektor potensial dan masih dapat berkembang (Kuadran III), yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja perekonomian di tingkat nasional, tetapi memiliki kontribusi yang lebih kecil dari nilai kontribusi di tingkat nasional.

#### **4.6 Hasil Analisis *Shift Share***

*Shift share analysis* digunakan agar mengetahui potensi dari produksi setiap sektor yang ada di wilayah tertentu dengan membandingkannya pada suatu kawasan referensi yang cakupannya lebih luas pada dua kurun waktu. Hasil dari analisis *shift share* dapat menjelaskan kemampuan kompetisi antara sektoral di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah yang lebih luas. Pada penelitian ini PDRB Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan PDB yang berguna untuk mengukur kinerja setiap sektor perekonomian dengan mengacu pada PDRB dengan harga konstan. Dengan menggunakan analisis *Shift Share*, dapat memberikan asumsi bahwasanya perubahan struktur ekonomi atau hasil kegiatan perekonomian suatu regional berhubungan positif dengan struktur atau kinerja suatu sektor ekonomi dengan wilayah di atasnya. Perubahan

kinerja sektor ekonomi suatu daerah terhadap wilayah di atasnya akan dipengaruhi oleh beberapa komponen. Alat analisis *shift share* klasik mengasumsikan bahwa pertumbuhan perekonomian di suatu daerah (Provinsi Papua Barat) dipengaruhi oleh (Y) dapat diuraikan menjadi komponen *shift* dan komponen *share* yaitu sebagai berikut:

- a. Komponen *National Share* ( $NS_i$ ), digunakan untuk melihat struktur atau posisi relatif suatu daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah yang menaunginya.
- b. Komponen *Proportional Shift* ( $Pr_i$ ) yang digunakan untuk mengukur besarnya *shift netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor PDRB Provinsi Papua Barat yang berubah. Jika  $Pr_i$  pada suatu sektor bernilai positif, maka sektor tersebut terspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat nasional dan tumbuh cepat, tetapi jika  $Pr_i$  negatif maka Provinsi Papua Barat berspesialisasi pada sektor-sektor yang pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun di tingkat nasional.
- c. Komponen *Differential Shift* ( $Dr_i$ ) merupakan komponen yang menghasilkan besarnya *shift netto* sebagai akibat dari PDRB Provinsi Papua Barat berubah. Apabila  $Dr_i$  pada suatu sektor bernilai positif artinya sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif, sedangkan apabila  $Dr_i$  pada suatu sektor bernilai negatif artinya sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif. Hasil perhitungan analisis *shift share* Provinsi Papua Barat ditampilkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Analisis *Shift Share* Provinsi Papua Barat 2010-2020**

Lapangan Usaha	2010-2020			
	NS <sub>i</sub>	Pr <sub>i</sub>	Dri	<i>Shift Share</i>
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.789,87	1.231,39	1.985,52	6.006,77
Pertambangan dan Penggalian	6.402,07	644,97	2.126,69	9.173,73
Industri Pengolahan	7.716,62	4.394,75	243,08	12.354,46
Pengadaan Listrik dan Gas	7,54	3,77	24,93	36,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,23	16,76	12,30	56,29
Konstruksi	1.832,39	1.301,95	7.131,65	10.265,99
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.178,64	590,36	3.427,78	5.196,78
Transportasi dan Pergudangan	420,00	253,51	1.073,86	1.747,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,04	58,82	245,05	422,92
Informasi dan Komunikasi	332,20	513,62	200,42	1.046,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	225,98	205,26	676,08	1.107,32
Real Estate	215,47	137,02	519,55	872,04
Jasa Perusahaan	23,71	23,11	13,85	60,66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.563,45	637,04	5.328,04	7.528,54
Jasa Pendidikan	518,32	382,57	384,96	1.285,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169,02	192,98	101,21	463,21
Jasa Lainnya	58,45	55,26	56,22	169,93

Data di atas menampilkan mengenai kinerja dari masing-masing sektor antara 2010-2020. Seluruh sektor yang ada di Provinsi Papua Barat memiliki nilai pertumbuhan riil positif, sehingga secara umum Provinsi Papua Barat masih masuk dalam kategori baik. Hasil ini sesuai dengan yang dijelaskan Wahyuningtyas dkk., (2013) bahwa apabila  $D_{ij}$  menunjukkan nilai positif, maka terjadi peningkatan kinerja ekonomi dari sektor tersebut.

Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor perekonomian di Provinsi Papua Barat dapat dilihat dari faktor-faktor yang ada termasuk terkait dengan ditunjukkan nilai pengaruh pertumbuhan dengan PDB Nasional (NS<sub>i</sub>) yang bernilai positif. Pertumbuhan seluruh sektor perekonomian Provinsi Papua Barat menunjukkan angka surplus dan lebih tinggi

dari kebijakan ekonomi nasional yang mampu memengaruhi sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Nilai pertumbuhan regional pada tahun 2010-2020 yang paling cepat di provinsi Papua Barat adalah industri pengolahan sebesar 7.716,62, kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6.402,07 dan yang ketiga adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2.789,87 dengan pembandingnya adalah PDB Nasional. Pertumbuhan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi, karena di Provinsi Papua Barat banyak industri yang aktivitasnya mengubah barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih bernilai.

Sektor perekonomian di regional yang mempunyai pertumbuhan dalam kategori lambat yaitu pengadaan listrik dengan perolehan nilai 7,54; jasa perusahaan sebesar 23,71; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 27,23. Sektor pengadaan listrik dan gas menjadi salah satu sektor yang berada pada posisi terendah sebab pada sektor listrik yang melambat berdampak pada konsumsi gas yang menurun. Hasil ini sejalan dengan Urbinas dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa sektor pengadaan listrik dan gas di Provinsi Papua Barat memiliki kontribusi terendah, meski demikian tetap menjadi sektor yang mendorong aktivitas produksi maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan yang diperoleh secara keseluruhan masing-masing sektor bernilai positif, maka kinerja dari seluruh sektor perekonomian di Provinsi Papua Barat bisa dijelaskan baik atau mempunyai keunggulan kompetitif yang baik di masing-masing sektor. Tetapi, hasil analisis yang diperoleh juga menunjukkan bahwa masing-masing sektor terdapat perbedaan hasil. Ada sektor dari perekonomian yang termasuk kategori kuat dan juga lemah. Seperti dijelaskan sebelumnya sektor industri pengolahan, konstruksi dan pertambangan dan penggalian menjadi sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

#### **4.7 Keterkaitan Ketimpangan dan Sektor Unggulan Provinsi Papua Barat**

Provinsi Papua Barat berdasarkan hasil analisis indeks Williamson dan Entropi Theil memiliki ketimpangan yang tinggi. Belum meratanya pembangunan ekonomi di berbagai wilayah menjadi aspek penting tingginya ketimpangan di Provinsi Papua Barat. Faktor ekonomi yang dapat membuat ketimpangan yang tinggi di Provinsi Papua Barat adalah terjadinya perbedaan kuantitas dan kualitas dari faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi dan perusahaan. Daerah yang dekat dengan pusat perkembangan mempunyai kesempatan untuk berkembang lebih besar jika dibandingkan dengan daerah yang berada di pinggiran. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan antar daerah (Mahardiki dan Santoso, 2013).

Disisi lain, sektor unggulan terbukti yang paling mampu berkontribusi pada pembangunan daerah, termasuk dalam pembentukan PDRB sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Namun, tidak semua wilayah di Provinsi Papua Barat memiliki potensi sektor unggulan yang memberikan sumbangan besar bagi daerah. Kabupaten di Provinsi Papua Barat yang kuat pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; pertambangan dan penggalan; Industri pengolahan; konstruksi; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terbukti dapat memberikan sumbangan terhadap ekonomi daerah, sehingga dipercaya dapat membantu pertumbuhan ekonomi di kabupaten yang memiliki potensi dari sektor unggulan.

Kabupaten yang tidak memiliki atau hanya masuk kategori sektor non basis, tanpa ada potensi yang masuk dalam sektor unggulan maka cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi rendah. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan di Provinsi Papua Barat tinggi dikarenakan masing-masing Kabupaten memiliki perbedaan potensi yang dilihat dari sektor unggulan.

Berdasarkan hal tersebut sektor unggulan dan ketimpangan memiliki keterkaitan. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam mengurangi ketimpangan. Pemerintah dapat mempertimbangkan sektor unggulan sebagai sarana mengurangi ketimpangan di Provinsi Papua Barat dengan berbagai upaya seperti membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan akses permodalan serta pendidikan. Karena untuk bisa menciptakan industri yang masuk kategori sektor unggulan perlu upaya-upaya terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengelola dengan baik dan menjadi pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang “**Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Sektor Unggulan di Provinsi Papua Barat**”, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Papua Barat menggunakan indeks Williamson dan Entropi Theil, diperoleh hasil rata-rata ketimpangan PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat selama periode 2014- 2020 mencapai nilai 1,50 dan indeks Entropi Theil 1,01. Hasil ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Papua Barat tinggi.
2. Berdasarkan hasil identifikasi sektor unggulan di Provinsi Papua Barat menggunakan *Location Quotien*, Tipologi Klassen, Shift Share dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Hasil analisis *Location Quotient* dapat disimpulkan bahwa ada golongan sektor utama yang dikategorikan sebagai sektor basis dan beberapa sektor unggulan di Provinsi Papua Barat. Sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Papua Barat yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertambangan dan penggalian; pertahanan dan jaminan sosial wajib; Industri pengolahan; konstruksi; dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.



- b. Hasil klasifikasi menggunakan Tipologi Klassen menjelaskan bahwa Provinsi Papua Barat hanya masuk pada dua kategori kuadran, yaitu sektor maju dan tumbuh pesat (Kuadran I) dan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Sektor yang masuk pada kategori maju dan tumbuh pesat yaitu sektor pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
- c. Hasil analisis *shift share* menunjukkan secara umum semua sektor memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nasional, hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan kinerja sektor perekonomian di Provinsi Papua Barat. Pertumbuhan sektor industri pengolahan menjadi yang tertinggi. Selain itu, sektor industri pengolahan; konstruksi; dan pertambangan dan penggalan menjadi sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka implikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan menggunakan indeks Williamson dan Entropi Theil Provinsi Papua Barat memiliki ketimpangan yang tinggi. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan maka saran yang dapat diberikan hendaknya pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan pengembangan infrastruktur kepada kabupaten- kabupaten yang selama ini tingkat pembangunannya masih tertinggal dengan mengalokasikan pengeluaran / belanja daerah yang lebih besar.
2. Berdasarkan analisis LQ, pemerintah Provinsi Papua Barat sebaiknya mulai mendorong sektor-sektor non basis yang memungkinkan untuk menjadi sektor potensial. Peran sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB

Provinsi Papua Barat sangat besar. Kemudian sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki kontribusi PDRB terbesar kedua, karena berdasarkan hasil LQ dari tahun 2014 hingga 2018 sektor pertambangan dan penggalian memiliki rata-rata LQ yang stabil lebih ( $LQ > 1$ ). Tentu saja, pemerintah Provinsi Papua Barat harus mampu menjaga dan meningkatkannya. Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat sebaiknya mulai meningkatkan sektor-sektor perekonomian yang belum tergolong sektor basis.

3. Berdasarkan klasifikasi Tipologi Klassen, sektor-sektor yang masuk pada kuadran III yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang pesat diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga menjadi sektor unggulan dan dapat meningkatkan PDRB Provinsi Papua Barat. Sektor yang perlu dikembangkan dan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa pendidikan dimana sektor ini memiliki. Secara umum seluruh sektor memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dari PDB Nasional, meski demikian memiliki rata-rata distribusi yang masih lebih kecil dari PDRB Nasional, sehingga perlu dikembangkan khususnya yang masih ada di Kuadran III.
4. Berdasarkan analisis Shift Share, pemerintah Provinsi Papua Barat sebaiknya terus menjaga dan meningkatkan pertumbuhan riil tiap sektor agar mendorong peningkatan PDRB Provinsi Papua Barat. Sektor pengadaan listrik dan gas menjadi pertumbuhan terendah, tetapi perannya cukup tinggi dalam mendorong sektor lainnya, untuk itu perlu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor listrik dan gas sebagai tulang punggung dalam perekonomian Provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah mulai untuk membangun agar pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi di Provinsi Papua Barat.

## Daftar Pustaka

- Anjani, Septi Rostika dan Farida, Syarifah Ida. (2020). Analisis Sektor Unggulan dan Perubahan Struktur Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Research Journal of Accounting and Business Management*, vol. 4, no. 2, hal: 148-163.
- Aryad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Baransano, M. A., Putri, I. K. P., Achzani, N. A., dan Kolopaking, L. (2016). Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 27, no. 2, hal: 119-136.
- Departemen Pertanian. (2005). (2021, Juni 18). *Landasan Teoritis dan Fakta Empiris*. From <http://www.deptan.go.id/konsep/landasan.htm>
- Dinc, M. (2002). Regional and Local Economic Analysis Tools: Prepared for the Public Finance, Decentralization and Poverty Reduction Program World Bank Institute. *The World Bank*, 1-25.
- DPR. (2020, Oktober 20). Rasio Gini. From <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-17.pdf>
- Hajeri, Yurisintae, E., dan Dolorosa, E. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu raya. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, vol. 4, no. 2, hal: 253-269.
- Hidayat, Muhammad dan Darwin, Ranti. (2017). Analisis Sektor Unggulan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. *Media Trend*, vol. 12. 2, hal: 156-157.
- Jhigan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kimura, E. (2007). Marginality and Opportunity in The Periphery: the Emergence of Gorontalo Province in North Sulawesi Indonesia. *Modern Indonesia Project Cornell University*, vol. 84, hal: 71-95.
- Kurian, N. J. (2007). Widening Economic and Social DisparitiesL Implication for India. *Indian Journal of Medical Research*, vol. 126, no. 4, hal: 374-380.
- Lessman, C. (2011). Regional Inequality and Decentralization. An Empirical Analysis. *Techische Universit at Dresden*.
- Luthfiyah, Ukhti dan Tallo, Amandus Jong. (2020). Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2019. *E-Jurnal PPS UNG*, vol. 6, no. 3, hal: 241-248.
- Mallarangang, Ikrar. (2018). Analisis Ketimpangan Pembangunan Sektor di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Kritis*, vol. 2, no. 1, hal: 1-38.
- Matsui, K. (2005). Post-Decentralization Regional Economies and Actors: Putting the Capacity of Local Goverments to The Test. *The Developing Economies*, vol. 43, no. 1, hal: 171-189.
- Maulana, Arif. (2009). Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, vol. 19, no. 1, hal: 1-46.
- Mudrajad, Kuncoro. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Nur, Indrayansyah. (2019). Analisis PDRB Sektor Ekonomi Unggulan Provinsi DKI Jakarta. *Indonesia Treasury Review*, vol. 4, no. 4, hal: 351-370.
- Pamrihnan, Alit dan Cahyadin, Malik. (2016). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Identifikasi Sektor Basis antar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, vol. 16, no. 2, hal: 75-87.

- Rachbini, Didik J. (2001). *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Restiatun. (2009). Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 10, no. 1, hal: 77-98.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D. R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Saputri, Intan dan Boedi, Arfida. (2018). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 2, no. 2, hal: 217-229.
- Sjafrizal. (2018). *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Padang Sumatera Barat: Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarsono, H., Nasikh, & Siti, M. (2017). *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*. Malang: Penerbit Gunung Samudera.
- Sutrisno, Adi. (2012). Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten dalam Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2007-2010. *Economics Development Analysis Journal*, vol. 1, no. 1, hal: 42-49.
- Todaro, M. P. Dan Smith, S. C. (2009). *Economic Development. Edisi Kesepuluh*. Boston: Pearson Addison Wesley.
- Urbinas, T. A., Waimbo, D. E., dan Yap, R. A. (2020). Klasifikasi Pertumbuhan Sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2017. *Jurnal Lensa Ekonomi*, vol. 1, no. 1, hal: 113-130.

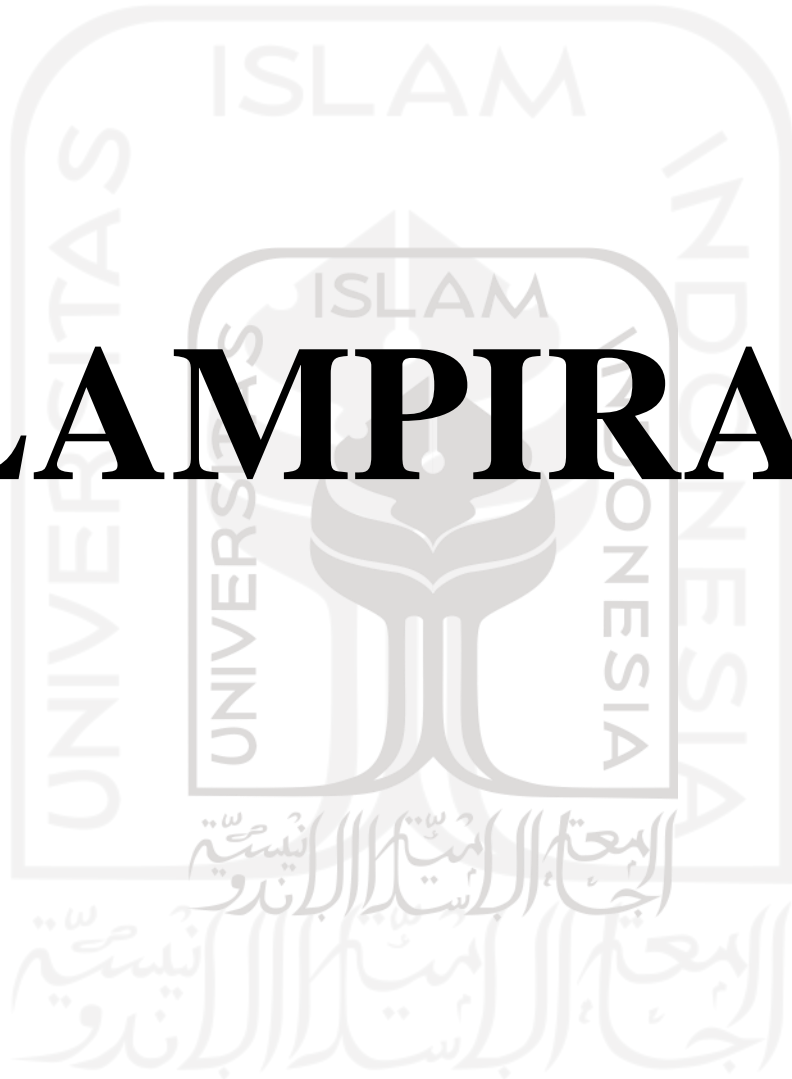
Wahyuningtas, R, A Rusgiyono, dan Y Wilandari. (2013). Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB : Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010. *Jurnal Gaussian*, hal: 219-228.

Ying, L. (2000). China's Regional Disparities During The Reform Period.

Yulianita, A. (2011). Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 7, hal: 70-85.



# LAMPIRAN



Lampiran I

**PDRB Kabupaten dan Kota Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2020**

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fakfak	2.611.541,11	2.801.967,22	2.948.829,28	3.159.027,98	3.367.230,08	3.545.307,64	3.440.577,18
Kaimana	1.438.384,14	1.509.904,59	1.557.818,58	1.647.555,90	1.739.446,02	1.803.958,82	1.762.286,56
Teluk Wondama	810.360,66	841.911,83	887.501,70	934.030,29	971.458,81	1.012.028,45	979.428,29
Teluk Bintuni	21.787.516,21	22.408.840,02	23.016.575,13	23.319.463,54	24.542.830,62	25.380.151,09	25.648.614,26
Manokwari	5.076.037,45	5.449.616,26	5.844.723,50	6.256.362,96	6.579.066,62	6.928.072,17	6.591.506,40
Sorong Selatan	959.097,61	1.020.523,49	1.082.125,85	1.163.012,81	1.234.567,39	1.304.829,73	1.256.442,63
Sorong	7.471.953,49	7.647.416,00	7.715.823,26	7.975.402,40	8.426.880,38	8.599.913,24	8.385.334,67
Raja Ampat	2.044.052,17	2.084.415,54	2.134.089,28	2.133.785,58	2.231.586,92	2.318.999,33	2.284.951,45
Tambrau	113.383,55	119.995,11	125.932,20	133.906,00	141.212,42	150.348,67	146.603,30
Maybrat	349.838,84	369.120,31	392.746,36	418.491,66	444.035,18	468.190,41	462.339,36
Manokwari Selatan	458.418,17	479.460,00	502.569,82	524.895,48	548.388,70	585.571,15	568.186,62
Pegunungan Arfak	106.001,48	113.070,27	116.637,33	120.555,83	133.354,14	139.967,78	146.643,69
Kota Sorong	7.317.729,33	8.069.057,50	8.799.522,01	9.526.382,84	10.167.676,57	10.472.937,86	10.135.218,57
<b>PDRB</b>	<b>50.544.314,21</b>	<b>52.915.298,14</b>	<b>55.124.894,30</b>	<b>57.312.873,27</b>	<b>60.527.733,85</b>	<b>62.710.276,34</b>	<b>61.808.132,98</b>



## Lampiran II

### PDRB Seri 2010 Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2020

Lapangan Usaha	Jumlah(Juta)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.889,56	4.732,73	5.026,11	5.557,69	6.273,30	6.834,47	7.291,37	7.850,36	8.331,31	8.896,80	9.033,23
Pertambangan dan Penggalian	11.220,37	11.630,72	11.531,44	12.262,10	12.083,77	12.254,99	12.748,08	12.893,13	14.319,75	14.714,55	14.477,44
Industri Pengolahan	13.524,27	14.124,79	14.606,98	16.049,53	17.549,76	18.062,14	17.594,11	18.618,95	21.359,15	21.711,73	21.469,66
Pengadaan Listrik dan Gas	13,21	13,16	15,87	14,42	18,43	23,97	26,47	31,28	35,29	40,33	44,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,72	48,42	51,21	53,92	59,49	66,10	70,34	75,90	81,13	85,72	89,40
Konstruksi	3.211,47	4.028,57	4.971,78	6.282,09	7.461,24	8.769,68	9.906,12	11.225,99	12.254,88	13.460,97	12.624,94
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.065,71	2.373,94	2.558,68	2.879,67	3.365,11	3.861,91	4.381,87	4.944,99	5.584,42	6.296,83	6.528,16
Transportasi dan Pergudangan	736,09	809,21	970,69	1.171,89	1.420,16	1.663,88	1.883,88	2.124,60	2.376,68	2.689,67	2.254,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	208,64	223,52	253,55	286,92	327,33	372,99	411,63	462,92	513,00	571,03	556,79
Informasi dan Komunikasi	582,22	589,32	687,98	744,46	852,31	932,04	1.051,99	1.176,69	1.299,17	1.474,07	1.682,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	396,05	453,43	583,78	761,13	876,99	997,67	1.048,70	1.128,16	1.204,81	1.339,51	1.431,88
Real Estate	377,63	412,33	479,14	550,59	648,10	732,23	820,56	918,12	1.024,20	1.128,56	1.137,32
Jasa Perusahaan	41,55	43,63	48,60	54,07	61,15	68,28	75,61	83,63	91,86	98,56	95,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.740,13	3.359,16	4.139,47	4.633,72	5.226,64	6.105,80	7.003,81	7.712,90	8.448,09	8.916,65	9.184,66
Jasa Pendidikan	908,41	965,71	1.011,01	1.170,07	1.389,22	1.505,14	1.602,14	1.754,53	1.859,03	2.003,37	1.963,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296,22	336,08	366,84	384,48	416,70	464,77	523,06	575,20	628,28	667,62	735,65
Jasa Lainnya	102,44	109,92	117,96	140,91	151,28	171,95	191,35	211,21	233,54	253,90	255,51
<b>Total PDRB</b>	<b>41.361,69</b>	<b>44.254,64</b>	<b>47.421,09</b>	<b>52.997,66</b>	<b>58.180,98</b>	<b>62.888,01</b>	<b>66.631,09</b>	<b>71.788,56</b>	<b>79.644,59</b>	<b>84.349,87</b>	<b>83.566,23</b>

### Lampiran III

#### PDB Seri 2010 Nasional Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2020

Lapangan Usaha	Jumlah(Juta)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	956,119.70	993,857.30	1,039,440.70	1,083,141.80	1,129,052.70	1,171,445.80	1,210,955.50	1,258,375.70	1,307,253.00	1,354,399.10	1,378,131.30
Pertambangan dan Penggalian	718,128.60	748,956.30	771,561.60	791,054.40	794,489.50	767,327.20	774,593.10	779,678.40	796,505.00	806,206.20	790,475.20
Industri Pengolahan	1,278,938.60	1,374,400.10	1,470,331.10	1,550,512.00	1,637,505.90	1,720,221.20	1,796,484.80	1,883,616.70	1,973,536.60	2,059,265.60	2,007,316.60
Pengadaan Listrik dan Gas	72,549.10	76,678.10	84,393.00	88,805.10	94,047.20	94,894.80	100,009.90	101,551.30	107,108.60	111,436.70	108,826.40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,848.50	6,125.10	6,329.80	6,539.90	6,882.50	7,369.00	7,634.60	7,985.30	8,429.40	9,004.90	9,449.30
Konstruksi	626,905.40	683,421.90	728,226.40	772,719.60	826,615.60	879,163.90	925,040.30	987,924.90	1,048,082.80	1,108,425.00	1,072,334.80
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	923,923.80	1,013,199.60	1,067,911.50	1,119,272.10	1,177,297.50	1,207,164.50	1,255,760.80	1,311,746.50	1,376,878.70	1,440,263.00	1,386,695.40
ZTransportasi dan Pergudangan	245,375.40	265,774.00	284,662.60	304,506.20	326,933.00	348,855.90	374,843.40	406,679.40	435,336.50	463,157.50	393,481.90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200,281.80	214,022.00	228,232.60	243,748.30	257,815.50	268,922.40	282,823.40	298,129.70	315,068.60	333,306.80	299,248.00
Informasi dan Komunikasi	256,048.10	281,693.80	316,278.70	349,150.10	384,475.60	421,769.80	459,208.10	503,420.70	538,762.70	589,536.10	651,930.90
Jasa Keuangan dan Asuransi	239,728.40	256,443.00	280,896.10	305,515.10	319,825.50	347,269.00	378,279.40	398,971.40	415,620.60	443,093.10	457,482.00
Real Estate	198,213.50	213,441.40	229,254.20	244,237.50	256,440.20	266,979.60	279,500.50	289,568.50	299,648.20	316,901.10	324,259.40
Jasa Perusahaan	99,085.40	108,239.30	116,293.30	125,490.70	137,795.30	148,395.50	159,321.70	172,763.80	187,691.10	206,936.20	195,671.10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259,646.10	276,336.80	282,235.30	289,448.90	296,329.70	310,054.60	319,965.00	326,514.30	349,277.60	365,533.80	365,440.90
Jasa Pendidikan	201,559.50	215,029.10	232,704.30	250,016.20	263,685.00	283,020.10	293,887.60	304,810.80	321,133.80	341,355.10	350,329.80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,444.70	72,592.10	78,380.10	84,621.40	91,357.10	97,465.80	102,490.20	109,497.50	117,322.20	127,522.10	142,309.70
Jasa Lainnya	101,061.00	109,372.40	115,675.40	123,083.10	134,070.10	144,904.20	156,507.50	170,174.80	185,405.60	205,011.40	196,608.70
<b>Total PDB</b>	<b>6,449,857.60</b>	<b>6,909,582.30</b>	<b>7,332,806.70</b>	<b>7,731,862.40</b>	<b>8,134,617.90</b>	<b>8,485,223.30</b>	<b>8,877,305.80</b>	<b>9,311,409.70</b>	<b>9,783,061.00</b>	<b>10,281,353.70</b>	<b>10,129,991.40</b>

## Lampiran IV

### Perhitungan Indeks Williamson

$$W = \sqrt{\sum \frac{(Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}{Y}}$$

$IW < 0,35$	Kesenjangan ekonomi taraf rendah
$0,35 < IW < 0,5$	Kesenjangan ekonomi taraf sedang
$IW > 0,5$	Kesenjangan ekonomi taraf tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	PDRB per Kapita (Rp per tahun)	Proporsi Penduduk			
		$f_i$	$p_i$	$Y_i = p_i / f_i$	$f_i / n$	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 (f_i / n)$
1	Fakfak	79,870	3,440,577	43.08	0.08	-16.99	288.70	23.49
2	Kaimana	61,820	1,762,287	28.51	0.06	-31.56	996.14	62.72
3	Teluk Wondama	33,234	979,428	29.47	0.03	-30.60	936.22	31.69
4	Teluk Bintuni	65,705	25,648,614	390.36	0.07	330.29	109092.61	7300.64
5	Manokwari	179,384	6,591,506	36.75	0.18	-23.32	543.97	99.39
6	Sorong Selatan	47,875	1,256,443	26.24	0.05	-33.82	1144.08	55.79
7	Sorong	91,134	8,385,335	92.01	0.09	31.94	1020.33	94.71
8	Raja Ampat	49,083	2,284,951	46.55	0.05	-13.52	182.67	9.13
9	Tambrauw	14,021	146,603	10.46	0.01	-49.61	2461.40	35.15
10	Maybrat	41,798	462,339	11.06	0.04	-49.01	2401.70	102.24
11	Manokwari Selatan	24,679	568,187	23.02	0.03	-37.05	1372.36	34.50
12	Pegunungan Arfak	31,793	146,644	4.61	0.03	-55.46	3075.37	99.59
13	Kota Sorong	261,426	10,135,219	38.77	0.27	-21.30	453.67	120.80
		<b>981,822</b>	<b>4,754,472</b>	<b>60.07</b>				<b>8069.83</b>

**89.83**

**Jumlah Penduduk**  
 $n$

**Rata-Rata**  
 $Y$

IW 2020	1.50
Keterangan	Ketimpangan Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	PDRB per Kapita (Rp per tahun)	Proporsi Penduduk			
		$f_i$	$p_i$	$Y_i = p_i / f_i$	$f_i / n$	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 (f_i / n)$
1	Fakfak	78,686	3,545,308	45.06	0.08	-16.81	282.53	23.17
2	Kaimana	60,216	1,803,959	29.96	0.06	-31.91	1018.05	63.88
3	Teluk Wondama	32,521	1,012,028	31.12	0.03	-30.75	945.30	32.04
4	Teluk Bintuni	64,406	25,380,151	394.07	0.07	332.20	110356.83	7406.75
5	Manokwari	175,178	6,928,072	39.55	0.18	-22.32	498.02	90.91
6	Sorong Selatan	46,922	1,304,830	27.81	0.05	-34.06	1159.85	56.71
7	Sorong	88,927	8,599,913	96.71	0.09	34.84	1214.00	112.50
8	Raja Ampat	48,493	2,318,999	47.82	0.05	-14.04	197.23	9.97
9	Tambrauw	13,879	150,349	10.83	0.01	-51.03	2604.29	37.67
10	Maybrat	40,899	468,190	11.45	0.04	-50.42	2541.93	108.34
11	Manokwari Selatan	24,220	585,571	24.18	0.03	-37.69	1420.37	35.85
12	Pegunungan Arfak	30,976	139,968	4.52	0.03	-57.35	3288.61	106.15
13	Kota Sorong	254,294	10,472,938	41.18	0.26	-20.68	427.69	113.34
		<b>959,617</b>	<b>62,710,276</b>	<b>61.87</b>				<b>8197.27</b>

**90.54**

**Jumlah Penduduk**  
***n***

**Rata-Rata**  
***Y***

IW 2019	1.46
Keterangan	Ketimpangan Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	PDRB per Kapita (Rp per tahun)	Proporsi Penduduk			
		$f_i$	$p_i$	$Y_i = p_i / f_i$	$f_i / n$	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 (f_i / n)$
1	Fakfak	77,381	3,367,230	43.51	0.08	-17.39	302.34	24.96
2	Kaimana	58,404	1,739,446	29.78	0.06	-31.12	968.44	60.33
3	Teluk Wondama	31,769	971,459	30.58	0.03	-30.32	919.54	31.16
4	Teluk Bintuni	63,091	24,542,831	389.01	0.07	328.10	107652.28	7245.01
5	Manokwari	170,897	6,579,067	38.50	0.18	-22.41	502.01	91.52
6	Sorong Selatan	46,021	1,234,567	26.83	0.05	-34.08	1161.21	57.01
7	Sorong	86,994	8,426,880	96.87	0.09	35.96	1293.45	120.03
8	Raja Ampat	47,885	2,231,587	46.60	0.05	-14.30	204.48	10.44
9	Tambrauw	13,804	141,212	10.23	0.01	-50.67	2567.75	37.81
10	Maybrat	40,102	444,035	11.07	0.04	-49.83	2483.04	106.22
11	Manokwari Selatan	23,617	548,389	23.22	0.03	-37.68	1419.99	35.77
12	Pegunungan Arfak	30,409	133,354	4.39	0.03	-56.52	3194.22	103.61
13	Kota Sorong	247,084	10,167,677	41.15	0.26	-19.75	390.14	102.83

<b>937,458</b>	<b>60,527,734</b>	<b>60.90</b>	<b>8026.70</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Rata-Rata</b>		<b>89.59</b>
<b><math>n</math></b>	<b><math>Y</math></b>		
		<b>IW 2018</b>	1.47
		<b>Keterangan</b>	Ketimpangan Tinggi

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	PDRB per Kapita (Rp per tahun)	Proporsi Penduduk				
		$f_i$	$p_i$	$Y_i = p_i / f_i$	$f_i / n$	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 (f_i / n)$	
1	Fakfak	76,102	3,159,028	41.51	0.08	-17.51	306.71	25.50	
2	Kaimana	56,882	1,647,556	28.96	0.06	-30.06	903.56	56.15	
3	Teluk Wondama	31,072	934,030	30.06	0.03	-28.96	838.88	28.48	
4	Teluk Bintuni	61,794	23,319,464	377.37	0.07	318.35	101347.06	6841.72	
5	Manokwari	166,780	6,256,363	37.51	0.18	-21.51	462.72	84.31	
6	Sorong Selatan	45,019	1,163,013	25.83	0.05	-33.19	1101.57	54.18	
7	Sorong	84,906	7,975,402	93.93	0.09	34.91	1218.60	113.03	
8	Raja Ampat	47,301	2,133,786	45.11	0.05	-13.91	193.57	10.00	
9	Tambrauw	13,785	133,906	9.71	0.02	-49.31	2431.46	36.62	
10	Maybrat	39,191	418,492	10.68	0.04	-48.35	2337.28	100.07	
11	Manokwari Selatan	22,983	524,895	22.84	0.03	-36.19	1309.37	32.88	
12	Pegunungan Arfak	29,731	120,556	4.05	0.03	-54.97	3021.57	98.14	
13	Kota Sorong	239,815	9,526,383	39.72	0.26	-19.30	372.48	97.59	
		<b>915,361</b>	<b>57,312,873</b>	<b>59.02</b>					<b>7578.65</b>

**Jumlah Penduduk**  
 $n$

**Rata-Rata**  
 $Y$

IW 2017	1.47
Keterangan	Ketimpangan Tinggi

**87.06**

No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	PDRB per Kapita (Rp per tahun)	Proporsi Penduduk				
		$f_i$	$p_i$	$Y_i = p_i / f_i$	$f_i / n$	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 (f_i / n)$	
1	Fakfak	74,772	2,948,829	39.44	0.08	-19.09	364.39	30.50	
2	Kaimana	55,503	1,557,819	28.07	0.06	-30.46	927.77	57.64	
3	Teluk Wondama	30,490	887,502	29.11	0.03	-29.42	865.45	29.54	
4	Teluk Bintuni	60,400	23,016,575	381.07	0.07	322.54	104033.70	7033.69	
5	Manokwari	162,578	5,844,724	35.95	0.18	-22.58	509.69	92.76	
6	Sorong Selatan	43,896	1,082,126	24.65	0.05	-33.87	1147.48	56.38	
7	Sorong	82,784	7,715,823	93.20	0.09	34.68	1202.54	111.43	
8	Raja Ampat	46,613	2,134,089	45.78	0.05	-12.74	162.40	8.47	
9	Tambrauw	13,699	125,932	9.19	0.02	-49.33	2433.82	37.32	
10	Maybrat	38,377	392,746	10.23	0.04	-48.29	2332.18	100.19	
11	Manokwari Selatan	22,519	502,570	22.32	0.03	-36.21	1311.09	33.05	
12	Pegunungan Arfak	28,898	116,637	4.04	0.03	-54.49	2969.20	96.05	
13	Kota Sorong	232,833	8,799,522	37.79	0.26	-20.73	429.87	112.04	
		<b>893,362</b>	<b>55,124,894</b>	<b>58.53</b>					<b>7799.05</b>

**88.31**

**Jumlah Penduduk**  
 $n$

**Rata-Rata**  
 $Y$

IW 2016	1.51
Keterangan	Ketimpangan Tinggi



No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	PDRB per Kapita (Rp per tahun)	Proporsi Penduduk			
		$f_i$	$p_i$	$Y_i = p_i / f_i$	$f_i / n$	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 (f_i / n)$
1	Fakfak	73,468	2,801,967	38.14	0.08	-19.66	386.64	32.59
2	Kaimana	54,165	1,509,905	27.88	0.06	-29.93	895.56	55.66
3	Teluk Wondama	29,791	841,912	28.26	0.03	-29.54	872.69	29.83
4	Teluk Bintuni	59,196	22,408,840	378.55	0.07	320.75	102881.46	6988.07
5	Manokwari	158,326	5,449,616	34.42	0.18	-23.38	546.70	99.32
6	Sorong Selatan	43,036	1,020,523	23.71	0.05	-34.09	1162.03	57.38
7	Sorong	80,695	7,647,416	94.77	0.09	36.97	1366.60	126.54
8	Raja Ampat	45,923	2,084,416	45.39	0.05	-12.41	154.07	8.12
9	Tambrau	13,615	119,995	8.81	0.02	-48.99	2399.87	37.49
10	Maybrat	37,529	369,120	9.84	0.04	-47.97	2300.76	99.08
11	Manokwari Selatan	21,907	479,460	21.89	0.03	-35.92	1289.94	32.42
12	Pegunungan Arfak	28,271	113,070	4.00	0.03	-53.80	2894.69	93.90
13	Kota Sorong	225,588	8,069,058	35.77	0.26	-22.03	485.45	125.66

<b>871,510</b>	<b>52,915,298</b>	<b>57.80</b>	<b>7786.06</b>
			<b>88.24</b>
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>IW 2015</b>	<b>1.53</b>
<b><math>n</math></b>	<b><math>Y</math></b>	<b>Keterangan</b>	<b>Ketimpangan Tinggi</b>

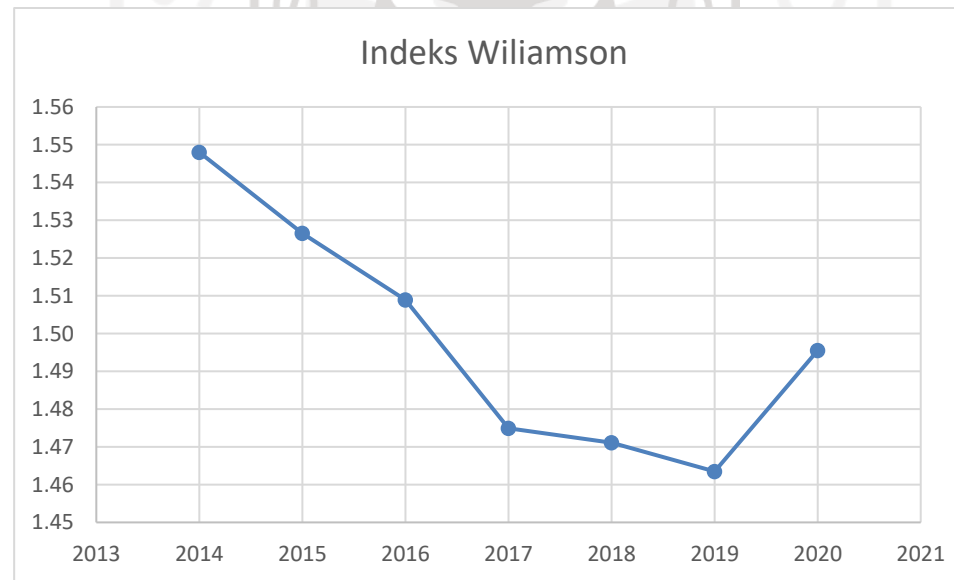
No.	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	PDRB per Kapita (Rp per tahun)	Proporsi Penduduk				
		$f_i$	$p_i$	$Y_i = p_i / f_i$	$f_i / n$	$Y_i - Y$	$(Y_i - Y)^2$	$(Y_i - Y)^2 (f_i / n)$	
1	Fakfak	72,189	2,611,541	36.18	0.08	-20.76	430.90	36.60	
2	Kaimana	52,473	1,438,384	27.41	0.06	-29.52	871.58	53.82	
3	Teluk Wondama	29,098	810,361	27.85	0.03	-29.09	845.95	28.97	
4	Teluk Bintuni	57,922	21,787,516	376.15	0.07	319.22	101900.25	6945.40	
5	Manokwari	154,296	5,076,037	32.90	0.18	-24.04	577.75	104.90	
6	Sorong Selatan	42,028	959,098	22.82	0.05	-34.11	1163.77	57.56	
7	Sorong	78,698	7,471,953	94.94	0.09	38.01	1444.77	133.80	
8	Raja Ampat	45,310	2,044,052	45.11	0.05	-11.82	139.76	7.45	
9	Tambrau	13,497	113,384	8.40	0.02	-48.53	2355.53	37.41	
10	Maybrat	36,601	349,839	9.56	0.04	-47.38	2244.52	96.67	
11	Manokwari Selatan	21,282	458,418	21.54	0.03	-35.39	1252.76	31.37	
12	Pegunungan Arfak	27,616	106,001	3.84	0.03	-53.10	2819.20	91.61	
13	Kota Sorong	218,799	7,317,729	33.44	0.26	-23.49	551.76	142.06	
		<b>849,809</b>	<b>50,544,314</b>	<b>56.93</b>					<b>7767.62</b>
								<b>88.13</b>	

**Jumlah Penduduk**  
 $n$

**Rata-Rata**  
 $Y$

IW 2014	1.55
Keterangan	Ketimpangan Tinggi

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2014	1.55	Tinggi
2015	1.53	Tinggi
2016	1.51	Tinggi
2017	1.47	Tinggi
2018	1.47	Tinggi
2019	1.46	Tinggi
2020	1.50	Tinggi
Rata-Rata	1.50	Tinggi



Lampiran V

Indeks Entropy Theil

$$(y) = \sum (y_j/Y) \times \log \log [(y_j/Y)/x_j/x]$$

No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Rata-Rata PDRB per Kapita	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Papua Barat	Perhitungan Indeks Entropi Theil 2014				
		$y_j$	$Y$	$x_j$	$X$	$y_j/Y$	$x_j/X$	$\log y_j/Y$	$\log x_j/X$	$\log (y_j/Y)/(x_j/X)$
1	Fakfak	36.18	56.93	72,189	849,809	0.63540	0.08495	-0.45349	-2.46572	0.18392
2	Kaimana	27.41	56.93	52,473	849,809	0.48146	0.06175	-0.73092	-2.78471	0.26248
3	Teluk Wondama	27.85	56.93	29,098	849,809	0.48915	0.03424	-0.71509	-3.37434	0.21192
4	Teluk Bintuni	376.15	56.93	57,922	849,809	6.60676	0.06816	1.88809	-2.68591	-0.70296
5	Manokwari	32.90	56.93	154,296	849,809	0.57782	0.18157	-0.54849	-1.70614	0.32148
6	Sorong Selatan	22.82	56.93	42,028	849,809	0.40082	0.04946	-0.91424	-3.00668	0.30407
7	Sorong	94.94	56.93	78,698	849,809	1.66761	0.09261	0.51139	-2.37939	-0.21493
8	Raja Ampat	45.11	56.93	45,310	849,809	0.79236	0.05332	-0.23274	-2.93148	0.07939
9	Tambrau	8.40	56.93	13,497	849,809	0.14755	0.01588	-1.91359	-4.14254	0.46194
10	Maybrat	9.56	56.93	36,601	849,809	0.16788	0.04307	-1.78450	-3.14494	0.56742
11	Manokwari Selatan	21.54	56.93	21,282	849,809	0.37833	0.02504	-0.97198	-3.68715	0.26361
12	Pegunungan Arfak	3.84	56.93	27,616	849,809	0.06742	0.03250	-2.69684	-3.42662	0.78703
13	Kota Sorong	33.44	56.93	218,799	849,809	0.58743	0.25747	-0.53200	-1.35686	0.39208
	Rata-Rata PDRB per Kapita Papua Barat	56.93	Jumlah Penduduk Papua Barat	849,809					Indeks Theil 2014	2.91746

No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Rata-Rata PDRB per Kapita	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Papua Barat	Perhitungan Indeks Entropi Theil 2015				
		$y_j$	$Y$	$x_j$	$X$	$y_j/Y$	$x_j/X$	$\text{Log } y_j/Y$	$\text{Log } x_j/X$	$\text{Log } (y_j/Y)/(x_j/X)$
1	Fakfak	38.14	57.80	73,468	871,510	0.65982	0.08430	-0.41579	-2.47338	0.16811
2	Kaimana	27.88	57.80	54,165	871,510	0.48227	0.06215	-0.72925	-2.77819	0.26249
3	Teluk Wondama	28.26	57.80	29,791	871,510	0.48892	0.03418	-0.71555	-3.37602	0.21195
4	Teluk Bintuni	378.55	57.80	59,196	871,510	6.54915	0.06792	1.87934	-2.68937	-0.69880
5	Manokwari	34.42	57.80	158,326	871,510	0.59549	0.18167	-0.51838	-1.70557	0.30393
6	Sorong Selatan	23.71	57.80	43,036	871,510	0.41025	0.04938	-0.89099	-3.00819	0.29619
7	Sorong	94.77	57.80	80,695	871,510	1.63956	0.09259	0.49443	-2.37955	-0.20778
8	Raja Ampat	45.39	57.80	45,923	871,510	0.78526	0.05269	-0.24174	-2.94326	0.08213
9	Tambrau	8.81	57.80	13,615	871,510	0.15248	0.01562	-1.88074	-4.15906	0.45220
10	Maybrat	9.84	57.80	37,529	871,510	0.17016	0.04306	-1.77101	-3.14511	0.56310
11	Manokwari Selatan	21.89	57.80	21,907	871,510	0.37864	0.02514	-0.97117	-3.68342	0.26366
12	Pegunungan Arfak	4.00	57.80	28,271	871,510	0.06919	0.03244	-2.67085	-3.42839	0.77904
13	Kota Sorong	35.77	57.80	225,588	871,510	0.61882	0.25885	-0.47994	-1.35152	0.35511
	Rata-Rata PDRB per Kapita Papua Barat	57.80	Jumlah Penduduk Papua Barat	871,510					Indeks Theil 2015	2.83134

No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Rata-Rata PDRB per Kapita	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Papua Barat	Perhitungan Indeks Entropi Theil 2016				
		$y_j$	$Y$	$x_j$	$X$	$y_j/Y$	$x_j/X$	$\text{Log } y_j/Y$	$\text{Log } x_j/X$	$\text{Log } (y_j/Y)/(x_j/X)$
1	Fakfak	39.44	58.53	74,772	893,362	0.67384	0.08370	-0.39476	-2.48055	0.15914
2	Kaimana	28.07	58.53	55,503	893,362	0.47956	0.06213	-0.73488	-2.77855	0.26448
3	Teluk Wondama	29.11	58.53	30,490	893,362	0.49735	0.03413	-0.69847	-3.37759	0.20679
4	Teluk Bintuni	381.07	58.53	60,400	893,362	6.51104	0.06761	1.87350	-2.69400	-0.69543
5	Manokwari	35.95	58.53	162,578	893,362	0.61426	0.18198	-0.48734	-1.70383	0.28603
6	Sorong Selatan	24.65	58.53	43,896	893,362	0.42121	0.04914	-0.86462	-3.01317	0.28695
7	Sorong	93.20	58.53	82,784	893,362	1.59251	0.09267	0.46531	-2.37876	-0.19561
8	Raja Ampat	45.78	58.53	46,613	893,362	0.78226	0.05218	-0.24557	-2.95311	0.08315
9	Tambrau	9.19	58.53	13,699	893,362	0.15707	0.01533	-1.85106	-4.17767	0.44308
10	Maybrat	10.23	58.53	38,377	893,362	0.17486	0.04296	-1.74378	-3.14753	0.55401
11	Manokwari Selatan	22.32	58.53	22,519	893,362	0.38132	0.02521	-0.96411	-3.68063	0.26194
12	Pegunungan Arfak	4.04	58.53	28,898	893,362	0.06896	0.03235	-2.67418	-3.43122	0.77937
13	Kota Sorong	37.79	58.53	232,833	893,362	0.64575	0.26063	-0.43735	-1.34467	0.32525
	Rata-Rata PDRB per Kapita Papua Barat	58.53	Jumlah Penduduk Papua Barat	893,362					Indeks Theil 2016	2.75916

No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Rata-Rata PDRB per Kapita	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Papua Barat	Perhitungan Indeks Entropi Theil 2017				
		$y_j$	$Y$	$x_j$	$X$	$y_j/Y$	$x_j/X$	$\text{Log } y_j/Y$	$\text{Log } x_j/X$	$\text{Log } (y_j/Y)/(x_j/X)$
1	Fakfak	41.51	59.02	76,102	915,361	0.70328	0.08314	-0.35199	-2.48724	0.14152
2	Kaimana	28.96	59.02	56,882	915,361	0.49073	0.06214	-0.71187	-2.77834	0.25622
3	Teluk Wondama	30.06	59.02	31,072	915,361	0.50929	0.03395	-0.67474	-3.38301	0.19945
4	Teluk Bintuni	377.37	59.02	61,794	915,361	6.39361	0.06751	1.85530	-2.69551	-0.68829
5	Manokwari	37.51	59.02	166,780	915,361	0.63555	0.18220	-0.45326	-1.70264	0.26621
6	Sorong Selatan	25.83	59.02	45,019	915,361	0.43769	0.04918	-0.82625	-3.01223	0.27430
7	Sorong	93.93	59.02	84,906	915,361	1.59143	0.09276	0.46463	-2.37777	-0.19541
8	Raja Ampat	45.11	59.02	47,301	915,361	0.76428	0.05167	-0.26882	-2.96279	0.09073
9	Tambrau	9.71	59.02	13,785	915,361	0.16458	0.01506	-1.80438	-4.19574	0.43005
10	Maybrat	10.68	59.02	39,191	915,361	0.18091	0.04281	-1.70973	-3.15087	0.54262
11	Manokwari Selatan	22.84	59.02	22,983	915,361	0.38694	0.02511	-0.94949	-3.68456	0.25770
12	Pegunungan Arfak	4.05	59.02	29,731	915,361	0.06870	0.03248	-2.67802	-3.42713	0.78142
13	Kota Sorong	39.72	59.02	239,815	915,361	0.67302	0.26199	-0.39599	-1.33945	0.29563
	Rata-Rata PDRB per Kapita Papua Barat	59.02	Jumlah Penduduk Papua Barat	915,361					Indeks Theil 2017	2.65215

No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Rata-Rata PDRB per Kapita	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Papua Barat	Perhitungan Indeks Entropi Theil 2018				
		$y_j$	$Y$	$x_j$	$X$	$y_j/Y$	$x_j/X$	$\text{Log } y_j/Y$	$\text{Log } x_j/X$	$\text{Log } (y_j/Y)/(x_j/X)$
1	Fakfak	43.51	60.90	77,381	937,458	0.71450	0.08254	-0.33617	-2.49443	0.13477
2	Kaimana	29.78	60.90	58,404	937,458	0.48903	0.06230	-0.71534	-2.77579	0.25771
3	Teluk Wondama	30.58	60.90	31,769	937,458	0.50209	0.03389	-0.68897	-3.38468	0.20356
4	Teluk Bintuni	389.01	60.90	63,091	937,458	6.38734	0.06730	1.85432	-2.69859	-0.68714
5	Manokwari	38.50	60.90	170,897	937,458	0.63211	0.18230	-0.45869	-1.70211	0.26948
6	Sorong Selatan	26.83	60.90	46,021	937,458	0.44048	0.04909	-0.81990	-3.01407	0.27202
7	Sorong	96.87	60.90	86,994	937,458	1.59052	0.09280	0.46406	-2.37733	-0.19520
8	Raja Ampat	46.60	60.90	47,885	937,458	0.76520	0.05108	-0.26761	-2.97437	0.08997
9	Tambrau	10.23	60.90	13,804	937,458	0.16797	0.01472	-1.78397	-4.21821	0.42292
10	Maybrat	11.07	60.90	40,102	937,458	0.18181	0.04278	-1.70480	-3.15175	0.54091
11	Manokwari Selatan	23.22	60.90	23,617	937,458	0.38126	0.02519	-0.96426	-3.68121	0.26194
12	Pegunungan Arfak	4.39	60.90	30,409	937,458	0.07201	0.03244	-2.63101	-3.42843	0.76741
13	Kota Sorong	41.15	60.90	247,084	937,458	0.67568	0.26357	-0.39204	-1.33344	0.29400
	Rata-Rata PDRB per Kapita Papua Barat	60.90	Jumlah Penduduk Papua Barat	937,458					Indeks Theil 2018	2.63235

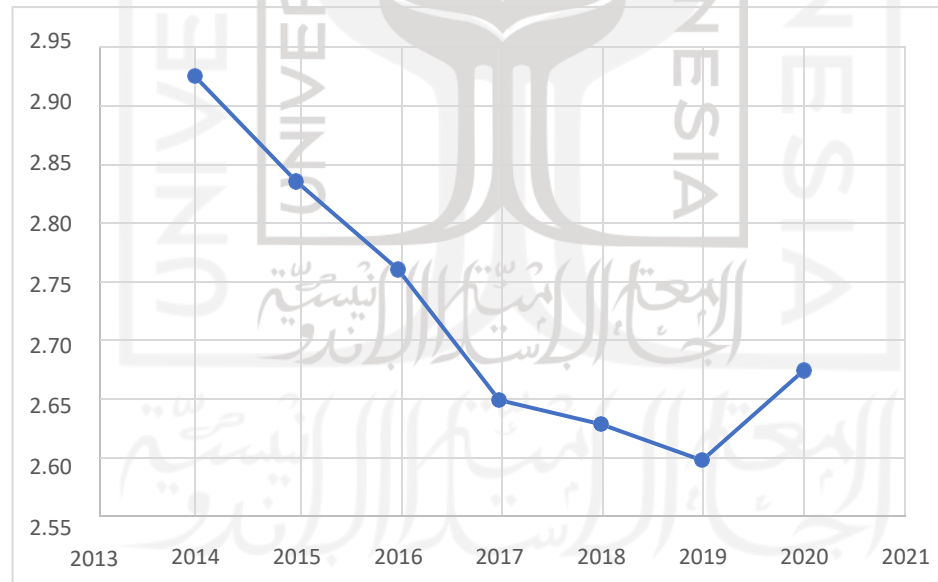


No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Rata-Rata PDRB per Kapita	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Papua Barat	Perhitungan Indeks Entropi Theil 2019				
		$y_j$	$Y$	$x_j$	$X$	$y_j/Y$	$x_j/X$	$\text{Log } y_j/Y$	$\text{Log } x_j/X$	$\text{Log } (y_j/Y)/(x_j/X)$
1	Fakfak	45.06	61.87	78,686	959,617	0.72830	0.08200	-0.31704	-2.50107	0.12676
2	Kaimana	29.96	61.87	60,216	959,617	0.48425	0.06275	-0.72515	-2.76860	0.26192
3	Teluk Wondama	31.12	61.87	32,521	959,617	0.50302	0.03389	-0.68713	-3.38465	0.20301
4	Teluk Bintuni	394.07	61.87	64,406	959,617	6.36975	0.06712	1.85156	-2.70133	-0.68543
5	Manokwari	39.55	61.87	175,178	959,617	0.63927	0.18255	-0.44742	-1.70073	0.26308
6	Sorong Selatan	27.81	61.87	46,922	959,617	0.44950	0.04890	-0.79961	-3.01805	0.26494
7	Sorong	96.71	61.87	88,927	959,617	1.56320	0.09267	0.44674	-2.37872	-0.18781
8	Raja Ampat	47.82	61.87	48,493	959,617	0.77299	0.05053	-0.25748	-2.98511	0.08626
9	Tambrau	10.83	61.87	13,879	959,617	0.17510	0.01446	-1.74237	-4.23616	0.41131
10	Maybrat	11.45	61.87	40,899	959,617	0.18504	0.04262	-1.68719	-3.15543	0.53469
11	Manokwari Selatan	24.18	61.87	24,220	959,617	0.39081	0.02524	-0.93955	-3.67936	0.25536
12	Pegunungan Arfak	4.52	61.87	30,976	959,617	0.07304	0.03228	-2.61676	-3.43332	0.76216
13	Kota Sorong	41.18	61.87	254,294	959,617	0.66571	0.26500	-0.40690	-1.32804	0.30639
	Rata-Rata PDRB per Kapita Papua Barat	61.87	Jumlah Penduduk Papua Barat	959,617					Indeks Theil 2019	2.60265

No.	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita	Rata-Rata PDRB per Kapita	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Papua Barat	Perhitungan Indeks Entropi Theil 2020				
		$y_j$	$Y$	$x_j$	$X$	$y_j/Y$	$x_j/X$	$\text{Log } y_j/Y$	$\text{Log } x_j/X$	$\text{Log } (y_j/Y)/(x_j/X)$
1	Fakfak	43.08	60.07	79,870	981,822	0.71714	0.08135	-0.33249	-2.50901	0.13252
2	Kaimana	28.51	60.07	61,820	981,822	0.47457	0.06296	-0.74534	-2.76518	0.26955
3	Teluk Wondama	29.47	60.07	33,234	981,822	0.49062	0.03385	-0.71209	-3.38584	0.21031
4	Teluk Bintuni	390.36	60.07	65,705	981,822	6.49859	0.06692	1.87159	-2.70424	-0.69209
5	Manokwari	36.75	60.07	179,384	981,822	0.61172	0.18271	-0.49148	-1.69988	0.28912
6	Sorong Selatan	26.24	60.07	47,875	981,822	0.43691	0.04876	-0.82804	-3.02082	0.27411
7	Sorong	92.01	60.07	91,134	981,822	1.53177	0.09282	0.42642	-2.37708	-0.17939
8	Raja Ampat	46.55	60.07	49,083	981,822	0.77500	0.04999	-0.25490	-2.99590	0.08508
9	Tambrauw	10.46	60.07	14,021	981,822	0.17407	0.01428	-1.74831	-4.24885	0.41148
10	Maybrat	11.06	60.07	41,798	981,822	0.18414	0.04257	-1.69203	-3.15656	0.53604
11	Manokwari Selatan	23.02	60.07	24,679	981,822	0.38328	0.02514	-0.95899	-3.68346	0.26035
12	Pegunungan Arfak	4.61	60.07	31,793	981,822	0.07679	0.03238	-2.56673	-3.43016	0.74828
13	Kota Sorong	38.77	60.07	261,426	981,822	0.64541	0.26627	-0.43786	-1.32326	0.33090
	Rata-Rata PDRB per Kapita Papua Barat	60.07	Jumlah Penduduk Papua Barat	981,822					Indeks Theil 2020	2.67626

### Hasil Perhitungan Indeks Theil

Tahun	Indeks Entropi Theil	Keterangan
2014	2.92	Tinggi
2015	2.83	Tinggi
2016	2.76	Tinggi
2017	2.65	Tinggi
2018	2.63	Tinggi
2019	2.60	Tinggi
2020	2.68	Tinggi
Rata-Rata	2.72	Tinggi



## Lampiran VI

### Data Indeks Location Quotien

No,	Lapangan Usaha	Tahun											Rata-Rata LQ
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,79746	0,74350	0,74771	0,74858	0,77685	0,78719	0,80220	0,80917	0,78284	0,80067	0,79457	0,78098
2	Pertambangan dan Penggalian	2,43645	2,42462	2,31106	2,26144	2,12652	2,15490	2,19268	2,14488	2,20834	2,22468	2,22015	2,24597
3	Industri Pengolahan	1,64898	1,60458	1,53619	1,51013	1,49846	1,41671	1,30481	1,28210	1,32940	1,28513	1,29654	1,42846
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02839	0,02680	0,02908	0,02369	0,02740	0,03408	0,03526	0,03995	0,04047	0,04411	0,04985	0,03446
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,27235	1,23425	1,25102	1,20284	1,20852	1,21029	1,22750	1,23285	1,18223	1,16030	1,14688	1,21173
6	Konstruksi	0,79883	0,92035	1,05571	1,18607	1,26201	1,34589	1,42675	1,47388	1,43626	1,48025	1,42717	1,25574
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,34865	0,36582	0,37049	0,37535	0,39964	0,43165	0,46490	0,48896	0,49820	0,53290	0,57067	0,44066
8	Transportasi dan Pergudangan	0,46779	0,47538	0,52729	0,56146	0,60734	0,64353	0,66959	0,67762	0,67060	0,70784	0,69447	0,60936
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,16245	0,16306	0,17178	0,17173	0,17751	0,18714	0,19391	0,20140	0,20000	0,20882	0,22555	0,18758
10	Informasi dan Komunikasi	0,35458	0,32664	0,33636	0,31107	0,30995	0,29816	0,30522	0,30317	0,29620	0,30477	0,31291	0,31446
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,25762	0,27607	0,32137	0,36346	0,38339	0,38763	0,36935	0,36677	0,35607	0,36848	0,37941	0,34815
12	Real Estate	0,29709	0,30162	0,32318	0,32888	0,35336	0,37005	0,39114	0,41125	0,41985	0,43408	0,42518	0,36870
13	Jasa Perusahaan	0,06539	0,06294	0,06462	0,06286	0,06205	0,06208	0,06323	0,06279	0,06012	0,05805	0,05941	0,06214
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,64566	1,89795	2,26794	2,33553	2,46606	2,65705	2,91633	3,06391	2,97102	2,97331	3,04666	2,56740
15	Jasa Pendidikan	0,70280	0,70120	0,67182	0,68276	0,73662	0,71755	0,72631	0,74660	0,71108	0,71535	0,67953	0,70833
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69519	0,72285	0,72372	0,66286	0,63773	0,64340	0,67994	0,68136	0,65780	0,63813	0,62664	0,66996
17	Jasa Lainnya	0,15807	0,15691	0,15769	0,16702	0,15776	0,16011	0,16289	0,16098	0,15472	0,15096	0,15754	0,15860

## Lampiran VII

### Tipologi Klassen

Lapangan Usaha	Data Nasional		Data Provinsi Papua Barat		Keterangan	Kuadran
	Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Distribusi	Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Distribusi		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.037	13.85%	0.064	10.81%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Pertambangan dan Penggalian	0.010	9.31%	0.026	21.00%	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
Industri Pengolahan	0.046	20.06%	0.048	28.65%	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
Pengadaan Listrik dan Gas	0.042	1.12%	0.136	0.04%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.049	0.09%	0.065	0.11%	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
Konstruksi	0.056	10.29%	0.151	12.99%	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.042	14.25%	0.123	6.26%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Transportasi dan Pergudangan	0.051	4.09%	0.124	2.51%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.042	3.15%	0.104	0.59%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Informasi dan Komunikasi	0.098	4.98%	0.113	1.56%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.067	4.08%	0.140	1.43%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Real Estate	0.051	3.12%	0.117	1.15%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Jasa Perusahaan	0.071	1.75%	0.088	0.11%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.035	3.71%	0.130	9.44%	Sektor maju dan tumbuh pesat	1
Jasa Pendidikan	0.057	3.26%	0.082	2.31%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.079	1.15%	0.096	0.77%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3
Jasa Lainnya	0.070	1.74%	0.097	0.28%	Sektor potensial atau masih dapat berkembang degnan pesat	3

## Lampiran VIII

### Analisis Shift Share

Lapangan Usaha	Data Provinsi Papua Barat		Data Nasional		rij	rin	rn	Nij	Mij	Cij	Dij
	2010	2020	2010	2020							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.889,56	9.033,23	956.119,70	1.378.131,30	0,85	0,44	0,57	2.789,87	1.231,39	1.985,52	6.006,77
Pertambangan dan Penggalian	11.220,37	14.477,44	718.128,60	790.475,20	0,29	0,10	0,57	6.402,07	644,97	2.126,69	9.173,73
Industri Pengolahan	13.524,27	21.469,66	1.278.938,60	2.007.316,60	0,59	0,57	0,57	7.716,62	4.394,75	243,08	12.354,46
Pengadaan Listrik dan Gas	13,21	44,75	72.549,10	108.826,40	2,39	0,50	0,57	7,54	3,77	24,93	36,24
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,72	89,40	5.848,50	9.449,30	0,87	0,62	0,57	27,23	16,76	12,30	56,29
Konstruksi	3.211,47	12.624,94	626.905,40	1.072.334,80	2,93	0,71	0,57	1.832,39	1.301,95	7.131,65	10.265,99
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.065,71	6.528,16	923.923,80	1.386.695,40	2,16	0,50	0,57	1.178,64	590,36	3.427,78	5.196,78
Transportasi dan Pergudangan	736,09	2.254,25	245.375,40	393.481,90	2,06	0,60	0,57	420,00	253,51	1.073,86	1.747,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	208,64	556,79	200.281,80	299.248,00	1,67	0,49	0,57	119,04	58,82	245,05	422,92
Informasi dan Komunikasi	582,22	1.682,83	256.048,10	651.930,90	1,89	1,55	0,57	332,20	513,62	200,42	1.046,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	396,05	1.431,88	239.728,40	457.482,00	2,62	0,91	0,57	225,98	205,26	676,08	1.107,32
Real Estate	377,63	1.137,32	198.213,50	324.259,40	2,01	0,64	0,57	215,47	137,02	519,55	872,04
Jasa Perusahaan	41,55	95,90	99.085,40	195.671,10	1,31	0,97	0,57	23,71	23,11	13,85	60,66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.740,13	9.184,66	259.646,10	365.440,90	2,35	0,41	0,57	1.563,45	637,04	5.328,04	7.528,54
Jasa Pendidikan	908,41	1.963,86	201.559,50	350.329,80	1,16	0,74	0,57	518,32	382,57	384,96	1.285,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296,22	735,65	66.444,70	142.309,70	1,48	1,14	0,57	169,02	192,98	101,21	463,21
Jasa Lainnya	102,44	255,51	101.061,00	196.608,70	1,49	0,95	0,57	58,45	55,26	56,22	169,93
	41.361,69	83.566,23	6.449.857,60	10.129.991,40							